

**PENGARUH KUNJUNGAN PRESIDEN ABDURRAHMAN
WAHID KE LUAR NEGERI TERHADAP UPAYA
PERBAIKAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI DI
INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Oleh : No. Induk :

Farid Faraitody
970910101230

Pembimbing :
Drs. H. Umaldi Radi, MA

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
2002**

5
Klass
338.9598
FAR
P
C.1

21 NOV 2002

LEMBAR PERNYATAAN

**SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH HASIL KARYA
ASLI SAYA DAN SEMUA BAHAN YANG DIGUNAKAN BERASAL DARI
SUMBER YANG SAH DAN DIKETAHUI**

PENULIS,

FARID FARAITODY

970910101230

PENGESAHAN

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
GUNA MEMENUHI DAN MELENGKAPI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA STRATA SATU
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

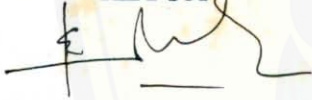
DIPERTAHANKAN DIDEPAN PENGUJI PADA :

HARI : SABTU
TANGGAL : 16
BULAN : NOVEMBER
TAHUN : 2002
JAM : 09.00

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

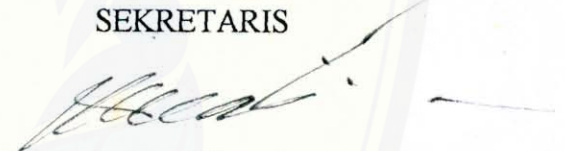
PANITIA PENGUJI

KETUA



(DR. Abubakar Eby Hara, MA)

SEKRETARIS



(Drs. H. Umaldi Radi, MA)

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. DR. Abubakar Eby Hara, MA
2. Drs. H. Umaldi Radi, MA
3. Drs. H. Nuruddin M. Yasin
4. Drs. Supriyadi, Msi



MENGETAHUI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEKAN



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhanaku kepada:

Mamaku, SITI NURJANAH dan Papaku, EDY SUMARSONO,
yang dengan segenap jiwa dan raga mencurahkan kasih dan sayang
serta pengorbanannya, tanpa keluh dan sesal demi memberi arti
dalam perjalanan hidupku;

Kedua Adikku, VERA OKTAVIYANTI dan DEWA AGUNG PAMUNGKAS
Yang selalu memberikan semangat, dorongan dan keceriaan dalam
hidupku;

Almamaterku tercinta; dan

Tanah Airku INDONESIA

Semoga ALLAH SWT. selalu memberkati dan melindungi kalian
semua..AMIN

MOTTO

SENI MENJADI BIJAKSANA ADALAH
TAHU APA YANG HARUS DIABAIKAN ¹

HEAL THE WORLD MAKE IT A BETTER
PLACE FOR YOU AND FOR ME AND THE
ENTIRE HUMAN RACE....²

¹ PEPATAH CINA dalam Hot Cord, No. 8 Tahun 2002

² HEAL THE WORLD, Michael Jackson, dalam album Dangerous

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pengaruh Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid Ke Luar Negeri Terhadap Upaya Perbaikan Kondisi Politik Dan Ekonomi Di Indonesia*". Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Umaidi Radi, MA, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat berharga bagi penulisan skripsi ini dan juga membimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs H. Nuruddin M. Yasin selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember;
4. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Keluarga Bapak Drs. Ir. H. Anshor Cholil, yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian di Jakarta;

6. Anugrah Terindah bagiku Aminatus Sholikhah SH. Terima Kasih atas dorongan, semangat serta kesabarannya;
7. Rekan-rekan HI'97 : Rina, Imam, Irfan, Feria, Ari, Yus(*thank's for all your spiritual advice*), Widi , Yudha (*where are You ?*) dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. *We are a good team;*
8. Sahabat-sahabatku di Bhumi Djawa No.3, terima kasih atas dorongan dan segala kritikan membangun yang diberikan selama penulis berinteraksi;
9. Rekan-rekan di UKM USEF, terus maju ya !;
10. Teman-teman KKN Kel. 55 Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Kota Kabupaten Bondowoso atas kenangan di desa semoga menjadi memori dan kisah klasik untuk masa depan;
11. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulisan skripsi ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik mereka dan akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 25 Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Judul.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
1.3 Permasalahan.....	7
1.4 Landasan Berpikir	8
1.5 Hipotesa.....	14
1.6 Metodologi Penelitian	14
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data.....	15
1.6.2 Teknik Analisa Data	15
1.7 Pendekatan	16
BAB II: BIOGRAFI ,PEMIKIRAN DAN POLITIK LUAR NEGERI	
PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID	
2.1 Biografi singkat Presiden Abdurrahman Wahid	18
2.2 Pengalaman Organisasi	19
2.3 Pemikiran Abdurrahman Wahid	20
2.4 Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi	22
2.5 Politik Luar Negeri Presiden Abdurrahman Wahid	24
2.5.1 Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri	28
2.5.2 Politik Luar negeri Indonesia dan Hak Asasi Manusia.....	30

**BAB III: PERMASALAHAN DALAM NEGERI DAN UPAYA
PENYELESAIAN MELALUI KUNJUNGAN KE LUAR
NEGERI OLEH PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID**

3.1 Krisis Ekonomi Yang Berkepanjangan dan Komitmen bantuan serta Dukungan Luar Negeri	35
3.1.1 Masalah Hutang Luar Negeri	36
3.1.2 Masalah Larinya Modal Asing ke Luar Negeri.....	37
3.1.3 Tingginya Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat	38
3.1.4 Komitmen Bantuan Serta Dukungan Luar Negeri sebagai Hasil kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid	38
3.2 Gejolak politik dalam negeri dan upaya dukungan luar negeri ..	43
3.2.1 Disintegrasi Bangsa	43
3.2.2 Konflik horizontal Diantara Masyarakat Indonesia	48
3.3 Hubungan Presiden Dengan TNI dan Pelanggaran HAM di Indonesia	52
3.3.1 Hubungan Presiden Dengan TNI	52
3.3.2 Pelanggaran HAM	53
3.4 Dukungan Luar Negeri terhadap Penyelesaian Gejolak Dalam Negeri.....	55
3.4.1 Dukungan terhadap Integrasi Bangsa	55
3.4.2 Hubungan Presiden dengan Militer dan Proses Demokratisasi Indonesia	59
3.4.3 Hasil Bagi Penegakkan Hak Asasi Manusia	61

**BAB IV: SIGNIFIKANSI HASIL KUNJUNGAN PRESIDEN
ABDURRAHMAN WAHID KE LUAR NEGERI
TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MASALAH DOMESTIK
DI INDONESIA**

4.1 Evaluasi hasil Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid	64
4.1.1 Kondisi ekonomi yang mengalami stagnasi	67

4.1.2 Belum Tuntasnya Gejolak Politik Dalam Negeri	72
4.2 Legitimasi Asing Tidak Mendukung Terciptanya Legitimasi Domestik	73
BAB V: KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I
PENDAHULUAN



UNIT UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang Judul

Politik Luar Negeri dalam aspeknya yang dinamis adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara lain. Didalamnya termasuk jumlah keseluruhan hubungan luar negeri suatu bangsa, tujuan dan kepentingan terbarunya. Penyusunan Politik Luar Negeri mungkin merupakan fungsi politik paling penting dari suatu negara didalam proses hubungan Internasional. Karena Pentingnya, perumusan politik Luar Negeri telah menjadi hak prerogatif pimpinan Eksekutif suatu negara sepanjang waktu.¹

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Politik Luar Negeri yang dijalankan suatu negara, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah menentukan alat pembanding yang tepat. Hal ini bisa dilakukan dengan menjabarkan unsur-unsur fundamental yang terdapat dalam politik luar negeri. Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara terdiri dari dua elemen utama yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit suatu negara sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan.²

¹ S.L Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 33

² Soesiswo Soenarko, " *Evaluasi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia*" dalam Juwono Sudarsono et al , *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996, hal 97

Dengan mengaitkan kedua elemen tersebut maka kita dapat menilai sejauh mana keefektifan pelaksanaan politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah suatu negara setelah menentukan rumusan politik luar negerinya adalah berupaya mencapai tujuan politik luar negeri dengan mengedepankan proses diplomasi sebagai alat atau metode untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini diplomasi merupakan sebuah tindakan yang relatif efektif dan *acceptable* dalam meraih kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai sebuah instrumen Politik Luar Negeri juga memerlukan aktor-aktor yang mampu mendukung dan memperjuangkan kepentingan negara.

Proses diplomasi akan berlangsung dengan baik apabila didukung oleh personel diplomasi yang baik pula. Tiap-tiap kepala negara juga merupakan personel diplomasi yang sangat kompeten untuk menjelaskan pandangan-pandangan mereka secara pribadi tentang hubungan kedua negara ataupun tentang permasalahan Internasional kepada kepala negara lain³

Peran diplomasi yang dilakukan oleh kepala negara atau Presiden sebagai personel diplomasi dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Untuk mengaplikasikan bahwa Presiden merupakan personil diplomasi yang baik maka dalam menjalankan roda pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid mempunyai kebijakan yang sedikit berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu seringnya Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Pada awalnya rakyat Indonesia masih menganggap wajar bahwa Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri, tetapi kemudian

³ K.J Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1988, hal 179

kebijakan tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden tersebut hanya menghamburkan uang negara. Tercatat selama menjadi Presiden yang kurang lebih hanya 22 bulan Presiden Abdurrahman Wahid telah melakukan kunjungan yang telah mencakup 50 negara di berbagai belahan dunia.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa dalam berbagai kunjungannya tersebut tidak membawa hasil yang bisa dinikmati secara langsung oleh seluruh masyarakat sehingga diharapkan bisa memperbaiki kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya harapan tentang perbaikan kondisi berbangsa dan bernegara ini dikarenakan pada awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Indonesia mengalami krisis di bidang politik dan ekonomi. Tantangan di bidang politik yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru ini antara lain, adanya ancaman disintegrasi bangsa yang dimunculkan oleh keinginan berpisahannya beberapa wilayah Indonesia selain itu juga kurang harmonisnya hubungan Presiden dengan Petinggi militer dikarenakan keinginan Presiden untuk mengadili Pelanggar Hak Asasi Manusia pada saat pelepasan Timor Timur dari wilayah Indonesia. Di bidang ekonomi tantangan yang harus dihadapi ialah mengajak pengusaha asing untuk kembali menanamkan investasinya di wilayah Indonesia hal ini dikarenakan para investor asing itu banyak yang melarikan modalnya ke luar negeri dikarenakan adanya berbagai kerusakan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, selain itu yang juga mendapat perhatian serius ialah masalah nilai tukar rupiah. Para pelaku usaha menginginkan adanya stabilitas nilai tukar rupiah sehingga dalam menjalankan usahanya mereka mendapatkan kepastian.

Masyarakat yang kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Presiden ini kemudian mempertanyakan apa alasan dan tujuan yang melatar belakangi kebijakan tersebut. Kondisi ini disebabkan rakyat melihat kenyataan pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu pada jaman Presiden Soekarno pemerintah memiliki kebijakan yang mendapatkan dukungan dari segenap rakyat karena ada alasan dan tujuan yang jelas. Namun tidak boleh kita pungkiri juga bahwa pada saat itu terdapat suatu kondisi bangsa dan politik internasional yang berbeda. Presiden Soekarno berhasil menciptakan isu yang ditentang secara bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yaitu anti Kapitalisme dan anti Kolonialisme. Isu demikian pada jaman pemerintahan Soekarno memang cepat mendapatkan dukungan karena secara emosional rakyat Indonesia masih sangat sensitif setelah bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Rencana Presiden Soekarno yang membuat Poros Jakarta-Pnom Penh-Pyong Yang-Peking juga mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat, karena Presiden berhasil meyakinkan rakyat dengan adanya kerja sama tersebut akan memberikan hasil yang positif bagi bangsa.⁴

Adanya perubahan kepemimpinan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto juga memberikan pengaruh pada pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia. Perubahan ini terjadi pada prioritas kepentingan dan lingkungan Internasional yang ada, hal ini tampak dari strategi diplomasi yang dijalankan Indonesia di dunia Internasional. Kepentingan yang ada pada masa pemerintahan Soeharto ialah peningkatan kondisi ekonomi dan stabilitas politik domestik. Tercapainya tujuan dari kepentingan tersebut mengakibatkan pada masa Presiden Soeharto pemerintahan yang dipimpinnya juga mendapatkan dukungan dari rakyat khususnya

⁴ A.Eby Hara, JawaPos, 17 Agustus 2001

pada kebijakan yang diambil dalam konteks Politik Internasional. Pemerintahan pada saat itu jelas ingin menunjukkan peran Indonesia di dunia Internasional. Hal ini bisa terlihat dari proaktifnya Indonesia untuk melibatkan diri dalam organisasi-organisasi Internasional seperti PBB, ASEAN, OPEC, OKI, APEC, WTO dan bahkan Indonesia juga pernah dipercaya sebagai pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non Blok.

Peran di dunia Internasional ini berlangsung dalam gaya yang tenang tetapi efektif sehingga tidak menimbulkan gejolak baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga merupakan implementasi dari politik bebas aktif yang menjadi dasar politik Luar negeri Indonesia.

Dengan melihat dua pemerintahan sebelumnya yang sedikit sekali frekwensi kunjungan Presiden ke Luar Negeri dan yang terpenting juga adanya dukungan bagi pemerintah dari dalam negerinya sendiri, maka dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid masyarakat mempertanyakan mengapa dengan seringnya kunjungan ke luar negeri tersebut tidak segera menjamin pulihnya kondisi ekonomi dan politik Indonesia. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa dengan adanya kunjungan yang terlalu sering ke berbagai negara, selain tidak efisien juga memperlihatkan bahwa pemerintahan ini tidak punya visi yang jelas dalam Politik Luar Negerinya⁵

Berbagai pandangan dan pernyataan bahwa pemerintah tidak mempunyai visi yang jelas dalam Politik Luar Negerinya karena dianggap bahwa pemerintah masih mencari negara, kebijakannya, dan bentuk kerjasama yang nantinya bisa memperbaiki kondisi Indonesia. Padahal kondisi bangsa pada saat itu khususnya politik dan ekonomi memerlukan penanganan yang cepat demi utuhnya

⁵ ibid

negara Indonesia. Kondisi Politik dan ekonomi itulah yang menuntut perbaikan dengan segera, kunjungan-kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Luar Negeri diharapkan bisa membawa pengaruh yang berarti bagi Proses perbaikannya.

Dengan kondisi bangsa yang seperti itu dan terdapat kebijakan Presiden untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke Luar Negeri maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

" Pengaruh Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Luar Negeri terhadap upaya perbaikan kondisi Politik dan ekonomi di Indonesia"

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Membahas suatu permasalahan, perlu adanya ruang lingkup pembahasan yang berfungsi sebagai kerangka bagi penulisan suatu karya ilmiah atau membatasi permasalahan agar dalam pembahasan nanti tidak keluar dari jalur dan kerangka masalah yang telah ditentukan. Pembatasan ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti dari permasalahan yang dibahas serta menghindari pembahasan yang terlalu meluas sehingga mengurangi bobot ilmiah suatu penulisan.

Ruang lingkup pembahasan juga akan membantu dalam menganalisa kejadian-kejadian pada kurun waktu tertentu, sebagaimana dinyatakan oleh Kartini Kartono dalam bukunya Pengantar Methodologi Research(1981), yakni :

"Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan limit waktu, pengongkosan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual, guna menyelidiki semua interelasi personal"⁶

1.2.1 Pembatasan Materi

'Penulis akan membatasi pembahasan dalam tulisan ini hanya menyangkut pada materi-materi yang relevan dengan

ada atau tidaknya pengaruh dari kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Luar Negeri dengan perbaikan kondisi bangsa khususnya di bidang ekonomi dan politik.

1.2.2 Pembatasan Waktu

Penetapan jangka waktu pembahasan tema ini oleh penulis dimulai sejak Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden pada bulan Oktober 1999 sampai dengan turunnya dari jabatan tersebut pada tanggal 23 Juli 2001.

Adanya penetapan dalam ruang lingkup materi dan waktu yang ditetapkan semata-mata hanya untuk memperjelas uraian dalam pembahasan.

1.3 Permasalahan

Permasalahan adalah kesulitan-kesulitan atau hambatan yang ada dan kita jumpai, kemudian menenuntut kita untuk mencari jalan keluarnya. Masalah akan mendorong untuk berfikir dan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan pemecahannya. Sebelum penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini berikut pendapat dari Winarno Surachmad tentang definisi permasalahan⁷:

"Masalah adalah kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui (dengan jalan mengaturnya) apabila kita akan berjalan terus"

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa banyak kritikan terhadap kunjungan-kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke

⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Methodologi Research*, Rajawali Press, Jakarta, 1981

⁷ Winarno Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, metode dan teknik*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 34

luar negeri dinilai dan dirasakan tidak mempunyai latar belakang dan visi yang jelas sehingga bagi masyarakat kunjungan yang dilakukan tidak mempunyai hasil yang jelas bagi perbaikan kehidupan bangsa.

Keyakinan Presiden untuk tetap melakukan kunjungan ke Luar Negeri dengan tujuan adanya kepentingan nasional yang ia bawa. Karena saat itu kondisi politik dan ekonomi Indonesia masih dalam tahap krisis maka tujuan Presiden Abdurrahman Wahid dengan kebijakannya tersebut adalah ingin meningkatkan kondisi internal bangsa Indonesia khususnya di bidang Politik dan Ekonomi.

Meskipun mendapatkan kritik yang sedemikian gencar dari publik dalam negeri baik itu dari pengamat masalah Internasional maupun dari lembaga Legislatif, Presiden Abdurrahman Wahid masih tetap pada pendiriannya dengan kebijakan kunjungan-kunjungan ke luar negerinya hingga di akhir masa pemerintahannya. Sikap Presiden yang demikian inilah yang kemudian mengundang timbulnya pertanyaan :

Sejauh manakah pengaruh kunjungan Presiden

Abdurrahman Wahid ke Luar negeri berpengaruh terhadap upaya perbaikan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia?

Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi pokok permasalahan yang akan dicari pemecahannya secara analitis di dalam pembahasan tulisan ini.

1.4 Landasan Berpikir

Landasan berpikir merupakan konsepsi yang diterapkan pada masalah-masalah yang khusus dan diperlukan sebagai pisau analisa terhadap masalah yang dihadapi, sehingga mendapatkan suatu penyelesaian yang akurat terhadap permasalahan yang ada.

Dalam hal ini penulis berusaha menganalisa pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga dalam landasan berpikir ini perlu diungkapkan tentang teori politik luar negeri beserta hal-hal yang berkaitan didalamnya.

Politik Luar Negeri menurut Sufri Yusuf SH adalah merupakan iringan kebijaksanaan disertai rentetan tindakan yang rumit tetapi dinamis, yang ditempuh oleh negara itu dalam hubungannya dengan negara lain atau sebagai kegiatannya dalam organisasi-organisasi regional dan Internasional.⁸ Dengan kata lain politik Luar Negeri dalam hal ini tidak semata-mata sebuah kebijakan yang terencana ataupun tertulis tapi juga dipraktekkan. Tindakan-tindakan yang mengikuti kebijakan luar negeri tersebut dilakukan pula oleh para pembuat kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan kepentingan negara tersebut.

Politik luar negeri menurut Mohtar Mas'oeed secara sederhana juga bisa didefinisikan secara sederhana juga bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan dengan situasi atau aktor yang ada di luar batas negara. Dalam hal ini kunci dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional yang merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum Internasional.⁹ Sedangkan menurut Lawrence Ziring, politik luar negeri merupakan suatu strategi atau formulasi perencanaan tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara *vis a vis* dengan negara lain atau entitas internasional untuk

⁸ Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar negeri: sebuah Analisis dan Uraian tentang Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal 113

⁹ Mohtar Mas'oeed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisasi*, PAU UGM Jogjakarta, 1989, hal 87

meraih tujuan spesifik dalam pengertian mewujudkan kepentingan Nasional.¹⁰

Pelaksanaan politik luar negeri didahului oleh penetapan kebijaksanaan dan keputusan serta harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor Nasional sebagai faktor Internal dan juga faktor Internasional sebagai faktor Eksternal.¹¹ Pertimbangan tentang berbagai faktor pendukung yang dimiliki dalam politik luar negeri merupakan sesuatu yang penting, dikarenakan ketepatan dalam pengambilan kebijakan akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan politik luar negeri tersebut.

Selain pertimbangan tentang faktor-faktor pendukung tersebut, dalam pelaksanaan politik luar negeri harus memperhatikan prioritas dan fokus yang akan diutamakan. Dengan adanya fokus dan prioritas tersebut maka segala kegiatan politik luar negeri akan terencana dengan baik sehingga hasilnya pun bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan dari politik luar negeri merupakan implementasi dari politik dalam negeri, sehingga apabila tujuan politik luar negeri tersebut tidak tercapai maka kondisi politik dalam negeri juga tidak akan mengalami perubahan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disusun dan keputusan-keputusan yang diambil di bidang politik negeri ditentukan oleh manusia dan manusia itu didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini kunci dari Politik Luar Negeri adalah kepentingan nasional, yang merupakan keseluruhan nilai yang

¹⁰ Andre H. Pareira, *Perubahan Global & Perkembangan Studi Hubungan Internasional* PACIS, Bandung, 1999, hal. 106

¹¹ Mohtar Mas'ood, *op.cit.* hal 91

hendak diperjuangkan atau dipertahankan dalam forum internasional oleh aktor-aktor politik luar negerinya.

Pelaksanaan Politik Luar Negeri juga mempunyai tujuan-tujuan, seperti yang diungkapkan oleh Morgenthau bahwa tujuan politik Luar negeri harus ditetapkan dalam persyaratan-persyaratan kepentingan nasional dan harus ditopang dengan kekuatan yang memadai.¹² Yang dimaksud kekuatan-kekuatan nasional demi menopang pelaksanaan politik luar negeri antara lain : kondisi geografi dari suatu bangsa, sumber daya alam, kemampuan industri, militer, populasi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.

Berkaitan dengan pentingnya penetapan tujuan dalam politik luar negeri sebagai prasyarat kepentingan nasional yang hendak dicapai maka K.J Holsti¹³, menekankan beberapa tujuan dalam kebijakan luar negeri yaitu tujuan jangka panjang dan pendek. Tujuan jangka pendeknya terdiri atas :

1. memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan Internasional;
2. meningkatkan prestise negara dalam sistem itu;
3. berbagai bentuk perluasan diri atau imperialisme.

Sedangkan tujuan jangka panjang adalah rencana,impian dan pandangan, mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sietem Internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tertentu didalamnya.

Instrumen dari pelaksanaan politik luar negeri salah satunya adalah Diplomasi. Instrumen inilah yang secara aktif dilaksanakan

¹² Hans.J.Morgenthau, *Politik Antar Bangsa (buku Ketiga)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal 329

¹³ K.J.Holsti, *op.cit* hal.146-14

oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan melakukan berbagai kunjungan ke Luar Negeri.

Diplomasi menurut Sir Ernest Satow¹⁴, " merupakan penerapan ketrampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah diantara negara-negara berdaulat". Terdapat definisi yang lebih mengena tentang diplomasi yang diungkapkan oleh KM.Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practise of Diplomacy* menyatakan diplomasi dalam hubungannya dengan politik Internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain¹⁵

Definisi diplomasi diatas mengungkapkan beberapa hal yang penting sehubungan dengan tujuannya. Tujuan diplomasi yang utama menurut Kautilya dalam Buku *Arthasastra* adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepan adalah pemeliharaan keamanan¹⁶ Tetapi selain pertimbangan keamanan, terdapat tujuan vital yang lain yaitu memajukan perekonomian, perdagangan, dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya¹⁷.

Secara luas tujuan diplomasi juga bisa dibagi atas : tujuan politik dan tujuan ekonomi.

¹⁴ Sir Ernés Satow, dalam Jusuf Badri, *Kiat Diplomasi: mekanisme dan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal 16

¹⁵ KM. Panikkar dalam S.L Roy, *op.cit* hal 3

¹⁶ Kautilya dalam S.L Roy, *ibid.* hal 6

¹⁷ *ibid.*, hal 6

1. Tujuan Politik dari diplomasi¹⁸

- a. meniadakan suatu keadaan yang merugikan kepentingan nasional misalnya mencegah masalah penanganan Hak Asasi Manusia di Indonesia agar tidak diambil alih oleh Mahkamah Internasional
- b. mempertahankan keadaan yang menguntungkan kepentingan nasional.
- c. Menegakkan keadaan yang diperlukan demi kepentingan Nasional

2. Tujuan Ekonomi dari Diplomasi

Penggunaan tindakan ekonomi sebagai bagian dari instrumen Politik luar negeri bukanlah hal baru dalam lingkup politik Internasional. Pada dasarnya diplomasi ekonomi bertujuan untuk meningkatkan hubungan luar negeri, hal tersebut diupayakan dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh personel-personel diplomasi. Pendekatan-pendekatan tersebut pada umumnya ditujukan kepada negara-negara yang memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi. Dari pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan bantuan maupun kerja sama ekonomi dari negara dengan potensi ekonomi besar terhadap negara dengan potensi ekonomi kecil.

Bantuan ekonomi dan kerja sama dari pihak asing dalam berbagi bentuk inilah bagi negar-negara yang masuk dalam kategori terbelakang atau belum maju dianggap sebagai tujuan ekonomi dari diplomasi yang dilaksanakannya. Menurut Alwi Shihab, dari segi ekonomi upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional :Kerangka Stu Analisis*, Binacipta,

Nasional, serta mengupayakan meningkatnya arus investasi asing dan kerjasama keuangan. Diplomasi sebagai instrumen dari pelaksanaan politik Luar negeri mempunyai peran penting bagi pencapaian kepentingan nasional kita.

Diplomasi "One Man Show"¹⁹ yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada dasarnya untuk lebih meyakinkan negara-negara yang dikunjunginya dan juga akan menambah kepercayaan dirinya sebagai Presiden karena dalam berbagai kunjungan tersebut Presiden akan menerima sambutan dan dukungan secara langsung dari pemimpin pemerintahan yang dikunjunginya. Hal inilah yang dijadikan modal legitimasi bagi pemerintahannya.

1.5 Hipotesa

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan, diperlukan adanya suatu hipotesa. Hipotesa adalah dugaan tentang hubungan diantara konsep-konsep, sesudah diuji dengan bukti-bukti yang ada berdasar azas-azas metode saintifik, sehingga generalisasi itu dapat ditolak²⁰

Dengan melihat permasalahan yang telah penulis kemukakan di awal dan fakta-fakta yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis memberikan hipotesa atau jawaban sementara adalah "*bahwa kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid keluar negeri memperoleh dukungan dan legitimasi Internasional terhadap pemerintahannya tetapi tidak signifikan berpengaruh pada upaya perbaikan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia.*

Bandung, 1987, hal 58

¹⁹ mengutip istilah Jimmy S. Hariyanto dalam Kompas, 20 Desember 2000

²⁰ Mohtar Mas'od, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* LP3ES, Jakarta, 1994, hal 177

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan tahap sebenarnya dari pembuatan tulisan ilmiah. Dalam tahap ini digunakan metode-metode tertentu agar sesuai dengan tujuan penulisan dari masalah yang hendak diteliti. Dalam hal ini penelitiannya berbentuk observasi tidak langsung yang menghasilkan data yang bersifat sekunder artinya data hasil dari pengamatan terhadap obyek yang dikumpulkan melalui lembaga tertentu yang kompeten.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku referensi, data dokumentasi, hasil-hasil studi terdahulu, jurnal, serta media massa. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Perpustakaan Center For Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta
4. Perpustakaan Pusat Universitas Gajahmada
5. Perpustakaan FISIP Universitas Gajahmada
6. Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Depertemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta
7. Biro Pusat Statistik Surabaya
8. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta

1.6.2 Tahap Analisa Data

Mengingat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung karena tersusun dalam bentuk kategori atau keterangan-keterangan maka tahap analisa data yang digunakan

adalah secara kualitatif. Untuk mencapai data yang diinginkan dengan baik maka penulis menggunakan metode deduktif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Prof.Dr.Sutrisno Hadi MA. tentang cara berpikir deduktif adalah sebagai berikut:

"berpikir deduktif dalah apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis itu, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa termasuk dalam kelas atau jenis itu"²¹

Untuk lebih sederhanannya menurut Jujun S. Suriasumantri (1999) deduksi merupakan cara berpikir dari hal yang bersifat umum ditarik ke kesimpulan yang bersifat khusus.²² Penggunaan metode analisa deduktif pada tulisan ini mengingat adanya penekanan teori dulu baru dilakukan penelitian. Penggunaan analisa deduktif kualitatif ini bertujuan untuk membuat penggambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dalam kasus yang diteliti.

1.7 Pendekatan

Untuk mencapai suatu sasaran bagi terwujudnya suatu karya ilmiah diperlukan adanya pendekatan adanya pendekatan. Menurut **Vernon Van Dyke**²³ "pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan, dengan kata lain pendekatan mencakup standart tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan data mana yang dikesampingkan"

Sehubungan dengan hal diatas maka penulis akan menggunakan *historical Aproach*, karena realita politik yang hidup

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Riset jilid I*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1986, hal 49

²² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal 311

²³ dalam Miriam Budiarjo, *Pendekatan-pendekatan ilmu Politik II* dalam jurnal Ilmu Politik I, PT Gramedia Jakarta, hal 4

dan berkembang pada saat ini merupakan rangkaian kesinambungan masa lalu. Pendekatan sejarah menurut **Jack Plano** dalam Kamus Analisa Politik²⁴ adalah pengkajian tentang kejadian-kejadian masa lampau menurut urutan waktu, menurut pendapat **Amien Rais**²⁵ bahwa peristiwa-peristiwa Internasional Kontemporer berdasar pendekatan sejarah sangat dipengaruhi oleh proyeksi kekuatan-kekuatan sejarah dan hubungan sejarah melalui masa kini ke arah masa depan. Sumbangan paling besar dari pendekatan sejarah bagi studi Politik Internasional adalah pengungkapan perubahan-perubahan disegala bidang yang telah terjadi di dunia.

Selain pendekatan sejarah dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan **kepentingan nasional**. Pendekatan ini dipilih sebagai cara pandang dengan memusatkan pada pencapaian tujuan dalam kepentingan nasional yang terdapat pada kebijakan-kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

²⁴ Jack C Plano dkk, 1982, *Kamus Analisa Politik*, CV Rajawali Press, Jakarta, hal.70

²⁵ Amien Rais, 1989, *Politik Internasional Dewasa ini*, Usaha Nasional, Surabaya, hal 29



BIOGRAFI, PEMIKIRAN DAN POLITIK LUAR NEGERI PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

2.1 Biografi singkat Presiden Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid tokoh kelahiran Jombang ini sejak muda menjadi sorotan publik hal ini dikarenakan ayahnya K.H Wahid Hasyim adalah seorang pejuang kemerdekaan yang juga terlibat dalam berbagai organisasi baik organisasi pemerintah maupun keagamaan. Dan sejak Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, beliau terpilih sebagai Menteri Agama RI pada kabinet Hatta, Natsir dan Sukiman Suwiryo. Kyai Wahid adalah kyai yang dikenal memiliki jiwa¹ toleransi yang tinggi terhadap perbedaan paham dan bersikap proporsional dalam menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi dan juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas hidup umat islam, selain itu ia juga memiliki sikap yang kritis, termasuk menyangkut umat islam sendiri. Watak yang dimiliki oleh Kyai Wahid Hasyim inilah yang nantinya akan sangat tampak pada pribadi Abdurrahman Wahid.

Sebagai anak seorang ulama Abdurrahman Wahid muda menghabiskan masa mudanya dengan mengembara di berbagai pesantren. Kemudian pada tahun 1964 Abdurrahman Wahid mempunyai kesempatan untuk belajar ke luar negeri yaitu ke Kairo, Mesir untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Karena dirasa tidak sesuai dengan sistem pengajaran di Kairo kemudian ia melanjutkan ke Baghdad disana ia mempelajari sastra Arab, filsafat dan teori sosial eropa. Pada tahun 1971 setelah ditolak

¹ Ma'mun Murod Al-Brebesy, 1999, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 110

oleh universitas-universitas di Eropa karena mahasiswa yang berasal dari Timur Tengah tidak memperoleh kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di Eropa membuat Abdurrahman Wahid pergi ke Mc Gill University, Kanada untuk melanjutkan mempelajari kajian-kajian islam secara mendalam ²

2.2 Pengalaman Organisasi

Setelah pulang dari menuntut ilmu di Luar Negeri, Abdurrahman Wahid langsung terlibat dengan berbagai kegiatan antara lain menjadi pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan juga mendirikan pesantren di Ciganjur , Jakarta Selatan. Selain itu ia juga aktif di LSM seperti Forum Demokrasi (Fordem) yang didirikannya dengan tokoh-tokoh dari semua golongan dan agama. Aktif sebagai narasumber dalam berbagai seminar yang diadakan baik Nasional maupun Internasional selain itu juga menjadi kolumnis di berbagai surat kabar. Keterlibatannya dalam lingkungan intelektual yang lebih luas di Jakarta terlihat pada tahun 1982-1985 dimana ia terpilih menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan sempat dua kali terpilih menjadi Ketua Dewan Juri Festival Film Nasional. Sehingga tidak mengherankan apabila pada waktu itu Abdurrahman Wahid lebih dikenal sebagai budayawan daripada sebagai seorang politikus atau Ulama'. Disamping itu juga Abdurrahman Wahid juga pernah menjadi Penasehat Koperasi di bawah Departemen Koperasi.

Di tahun 1980 hingga 1983 Abdurrahman Wahid dipilih sebagai salah seorang yang turut serta memberikan pertimbangan atas penghargaan Agha Khan Award untuk arsitektur Islam di

² dirangkum dari beberapa buku : *Metemorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia* tulisan Gaffar Karim. 1995, LkiS, Jogjakarta; *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang negara*, tulisan Ma'mun Murod, 1999, Raja Grafindo Persada, Jakarta; Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, 1999, *Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*.

Indonesia dan sejak tahun 1994 ia menjadi penasehat untuk *The International Dialogue Foundation Project on Prospective Studies and Secular Law* (Proyek pembinaan dialog Internasional untuk Kajian-Kajian Wawasan dan Hukum Sekular) di Den Haag.³ Selain itu ia juga mendapatkan penghargaan Magsaysay dari Filipina, pada tanggal 31 Agustus 1993, karena dinilai berhasil memainkan peran penting sebagai integrator bangsa, membangkitkan semangat kerukunan antar umat beragama, dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap demokrasi. Ia juga duduk sebagai Presiden pada konferensi dunia untuk agama dan perdamaian (*World Council for Religion and Peace*) dan juga menjadi Dewan pembina *Institute Simon Perez*.

Pada bulan Desember 1984, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Ketua Umum PB. Syuriah Nahdlatul Ulama untuk yang pertama kali dan akhirnya berturut-turut sampai tiga periode. Dan pada Akhirnya mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1999.

2.3 Pemikiran Abdurrahman Wahid

Greg Barton⁴ seorang sarjana Universitas Deakin, Australia mengemukakan Abdurrahman Wahid merupakan seorang Intelektual yang mewakili perpaduan dua tradisi; kesarjanaan Islam Tradisional dan pendidikan Barat Modern. Barton mencoba menelusuri tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid untuk memahami pemikirannya dan menemukan bahwa tema humanitarisme liberal merupakan tema dominan dari pemikirannya.⁵ Tema liberal secara fundamental itulah yang mendapat tempat besar

³ Greg Barton, 1997, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Pustaka Antara, Jakarta, hal. 329

⁴ Greg Barton dan Greg Falley, 1997, *Tardisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama'-negara*, LKiS, jogjakarta, hal. 166-167

⁵ *ibid*, hal 167

dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam Tradisional.

Greg Barton, Fachri Ali, Bachtiar Effendi⁶ memasukkan Abdurrahman Wahid dalam kategori pemikir neo-modernisme Islam. Barton sendiri menyebut lima cirri yang menonjol dari aliran neo-modernis yaitu:

Pertama, neo-modenis adalah gerakan pemikiran yang progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Hal ini bukan berarti neo-modenisisme tidak bersikap kritis terhadap pembangunan. Aliran ini justru sangat kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari pembangunan seperti ketidakadilan.

Kedua, berbeda dengan aliran fundamentalisme, neo-modenisisme tidak melihat barat sebagai ancaman atas Islam. Dalam hal ini neo-modenis tidak hanya membela ide-ide liberal barat seperti demokrasi dan hak-hak asasi manusia, tetapi juga juga mengajukan argumentasi bahwa Islam mempunyai kepedulian yang sama dengan Barat tentang hal ini.

Ketiga, neo-modenisisme Islam mempunyai semangat sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu upaya membangun titik temu antara Islam dan negara.

Keempat, neo-modenisisme sangat mengedepankan pemahaman islam yang terbuka, Inklusif dan liberal utamanya dalam menerima pluralisme masyarakat dan menekankan toleransi dan harmoni dalam hubungan antar komunal.

Kelima, neo-modenisisme banyak mewarisi semangat Muhammad Abduh dalam rasionalisme Ijtihad secara kontekstual

⁶ Greg Barton, Fachri Ali, dan Bachtiar Effendi, dalam tulisan Umaruddin masdar, 1999, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hal 121

yang berusaha membuat perpaduan antara khazanah pemikiran Islam Tradisional dengan keharusan berijtihad, serta gagasan barat dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora.

2.4 Pandangan Abdurrahman Wahid tentang Demokrasi

Pandangan Abdurrahman Wahid tentang demokrasi terlihat dari diterimanya pandangan tentang kebebasan individu yang meliputi kebebasan berpikir, berorganisasi dan beragama serta aspek-aspek fundamental yang lain.⁷

Abdurrahman Wahid menunjukkan sikap penerimaannya terhadap paham liberal yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bebas dan berdaulat. Dengan kebebasan penuh yang dimilikinya manusia akan berkembang menjadi manusia yang kreatif dan produktif sehingga mampu mengemban nilai tugas mulianya sebagai kholifah di muka bumi. Namun ia juga menolak secara tegas masyarakat tanpa aturan atau norma karena hal itu bisa menimbulkan anarki dan situasi yang penuh kerusakan.

Menurut Abdurrahman Wahid, liberalisme adalah filsafat hidup yang mementingkan hak-hak dasar manusia atas kehidupan. Ia juga memiliki keyakinan akan perlunya mutlak ditegakkan kedaulatan hukum, perlakuan sama, didepan hukum atas semua warga negara tanpa memandang asal etnis, budaya dan agama. Liberalisme bahkan melindungi mereka yang berpendapat dari kelompok minoritas. Dengan kata lain liberalisme memiliki nilai-nilai yang mendukung peradaban tinggi.⁸

⁷ Abdurrahman Wahid, *UUD 1945, HAM, Kedaulatan Hukum dan SDM* dalam Umaruddin Masdar, *op.cit.* hal 131

⁸ *ibid* hal. 141

penting sebagai salah satu modus operandi. Itu sebabnya setelah menjadi presiden dia langsung melakukan kunjungan-kunjungan ke manca negara untuk melaksanakan diplomasi pribadinya¹⁵.

2.5.1 Pergeseran Orientasi Politik Luar Negeri

Indikasi adanya pergeseran orientasi politik luar negeri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid terlihat beberapa minggu setelah Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden. Ia mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan sikap pro dan kontra yaitu membuka hubungan dagang dengan Israe, dengan alasan bahwa hubungan itu selain membantu perekonomian Indonesia, juga akan meningkatkan *leverage diplomatic* Indonesia di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam konteks penyelesaian masalah Israel-Palestina.¹⁶

Indikasi lain adanya pergeseran orientasi adalah ketika Preside Abdurrahman Wahid menyebut Cina, Jepang, dan India sebagai bagian penting dari hubungan luar negeri Indonesia.¹⁷ Pernyataan Presiden ini menyiratkan bahwa ketiga negara itu akan menjadi jaringan inti pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Meskipun mungkin kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk meninggalkan barat (Amerika Serikat), dan ini bahkan telah dijelaskan kembali oleh Abdurrahman Wahid kepada Presiden Clinton ketika ia berkunjung ke Amerika Serikat. Perhatian kepada ketiga negara besara Asia, merupakan sinyal bahwa Indonesia bersama kekuatan-kekuatan Asia lainnya akan menjadi faktor strategis dalam pembentukan tatanan hubungan Internasional di Asia Pasifik, khususnya dalam bidang keamanan. Bisa jadi, perhatian terhadap ketiga negara besar Asia itu

¹⁵ kompas 1 juli 2001

¹⁶ Bantarto Bandoro, 1999, *Politik Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid : sebuah refleksi ke Depan*, CSIS tshun XXVIII, No. 4 hal 393

¹⁷ Media Indonesia, 9 November 1999

Demokrasi menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya pola interaksi dan relasi politik yang sederajat, tidak eksploitatif dan mendukung tegaknya pluralisme bangsa. Dalam demokrasi pluralisme tidak semata-mata sebagai sesuatu yang humanis tetapi juga karunia Tuhan yang bersifat permanen, karena tanpa pluralisme sejarah dan peradaban manusia tidak akan produktif.

Minat Abdurrahman Wahid yang sangat tinggi terhadap demokrasi didorong oleh cita-cita untuk menegakkan pluralisme itu. Dalam dunia modern, demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar bersama-sama menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa.⁹

Bagi Abdurrahman Wahid tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bias menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling memberi dan menerima¹⁰. Karena salah satu substansi dari demokrasi adalah kebebasan untuk saling memberi dan menerima.¹¹

⁹ Arif Afandi (ed.), 1997, *Islam Demokrasi Atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hal. : 117-118

¹⁰ Abdurrahman wahid, *Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia*, makalah pada seminar Agama dan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 20 November 1991

¹¹ Arif Afandi (ed.) *op.cit.* hal. :118

2.5 Politik Luar Negeri Presiden Abdurrahman Wahid

Politik Luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan suatu hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut sistem sosial politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang, serta cara kita memposisikan diri kita di dunia Internasional.

Di lingkup Internasional, perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika Internasional dan globalisasi saat ini dicirikan antara lain, perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar, semakin banyaknya dibentuk forum global, meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan Internasional; dan munculnya isu-isu baru dalam agenda Internasional seperti HAM, Demokratisasi, lingkungan hidup dan lain sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antar bangsa.

Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan Internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian Nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan Internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi Indonesia .

❖ Dasar-dasar politik luar negeri

Pada dasarnya politik luar negeri Republik Indonesia tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara . GBHN antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas Aktif dan berorientasi pada kepentingan Nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa, dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Disamping itu dengan telah disahkannya UU NO. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, maka pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut.¹²

Perubahan-perubahan dalam tata hubungan internasional yang kini dihadapi politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh sejumlah kecenderungan global yang fundamental yaitu:

- 1) Tampilanya Amerika Serikat sebagai adidaya politik militer satu-satunya didunia yang bersumbu pada kekuatan-kekuatan politik ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur;
- 2) Arus globalisasi dan interdependensi semakin menguat serta adanya saling keterkaitan antra berbagai masalah global baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya;
- 3) Semakin menguatnya peranan aktor non pemerintah dalam percaturan internasional atau *multi track diplomacy*;

¹² Alwi Shihab, *Garis Besar Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI Memasuki Abad ke 21*, sambutan pada acara curah pendapat Perkembangan Dunia dan Kebijakan Luar Negeri RI, Di Jakarta 22 November 2000

- 4) Semakin menonjolnya masalah-masalah transnasional seperti hak asasi manusia, demokrasi, *good governance*, dan lingkungan hidup dalam agenda internasional.¹³

Dalam GBHN pemerintah Reformasi menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi maka departemen luar negeri telah menetapkan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang disebut *ecumenical diplomacy*¹⁴ yaitu, merangkul semua negara untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dan memprioritaskan:

- 1) pemulihan citra Indonesia dimata masyarakat Internasional;
- 2) pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum;
- 3) pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa;
- 4) peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata;
- 5) Memajukan Kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia.

Upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya diforum internasional perlu ditopang dengan penggerakan segenap potensi sumber daya yang ada

¹³ *ibid*, hal 3

¹⁴ *ibid*, hal 4

untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi di dunia Internasional. Oleh sebab itu Indonesia perlu menerapkan kebijaksanaan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat mencari manfaat yang maksimal dari dinamika hubungan internasional tersebut. Sejalan dengan krisis multi dimensi yang menimpa Indonesia maka upaya-upaya diplomasi diarahkan pada usaha untuk memulihkan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat citra Indonesia dimata internasional saat ini sedang dalam keadaan terpuruk sehingga perlu dipulihkan kembali. Pemulihan citra ini merupakan salah satu kepentingan nasional karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan dunia internasional dan untuk menjamin arus investasi yang masuk ke Indonesia. Politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa, serta stabilitas Nasional. Diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus dalam rangka menjunjung tinggi kepentingan nasionalnya. Adanya konflik yang terjadi diberbagai wilayah Republik Indonesia perlu dijamin agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi Indonesia.

Dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid kebijakan luar negeri terutama berada ditangan Presiden, Menteri Luar Negeri hanya pelaksana belaka karena Presiden Abdurrahman Wahid mempunyai berbagai pengalaman sebelum menjadi Presiden, yaitu aktif dalam lembaga swadaya masyarakat selaku ketua Nahdatul Ulama. Pengalaman itulah yang menjadi landasan bagi penentuan kebijakan-kebijakannya termasuk kebijakan luar negeri. Sebagai pemimpin lembaga swadaya masyarakat diplomasi pribadi bagi Abdurrahman Wahid sangat penting sebagai salah satu modus operandi. Itu sebabnya setelah

ditafsirkan sebagai penguatan langkah lanjutan mereka untuk melakukan semacam Asianisasi tatanan regional.

Banyak yang menilai langkah baru Presiden Abdurrahman Wahid itu sebagai koreksi terhadap pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sebelumnya dan untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan Barat dengan membangun Poros Cina –India- Jepang disatu sisi dan menyeimbangkan negara-negara Islam radikal dengan menjalin kontak terbuka dengan Israel disisi lain.¹⁸ Proses mencari keseimbangan baru ini memang merupakan gejala era pasca perang dingin. Kebijakan Abdurrahman Wahid ini bukan semata-mata untuk membangun “kemitraan strategis “ dengan negara-negara kunci Asia guna mengimbangi Barat tetapi, menciptakan perubahan-perubahan di negara kunci Asia agar mereka lebih responsif terhadap kebutuhan Indonesia.¹⁹

Berakhirnya era perang dingin memang telah mendorong negara-negara di Asia Pasifik untuk menata kembali hubungan Internasional mereka dan menciptakan lingkungan strategis dan keamanan yang lebih stabil dan konstruktif. Hingga kini, upaya-upaya ke arah itu tetap berlangsung dan negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan ASEAN, adalah kelompok negara-negara yang memiliki insentif paling besar untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan. Oleh karena itu bisa dipahami jika ASEAN merintis dan melansir langkah-langkah membangun pengaturan-pengaturan regional. Jadi apa yang dilakukan oleh ASEAN sesungguhnya adalah ASEANisasi tatanan kawasan, termasuk dalam masalah-masalah keamanan. Jika dilihat dari prespektif demikian, maka langkah Presiden Abdurrahman Wahid untuk membentuk tatanan regional yang berpusat pada hubungan

¹⁸ Suara Pembaruan, 26 Oktober 1999

¹⁹ KOMPAS, 31 Oktober 1999

Indonesia-Cina-Jepang-India bisa ditafsirkan sebagai bagian dari proses Asianisasi tatanan regional. Kunjungan Abdurrahman Wahid ke negara-negara ASEAN juga harus dilihat dalam konteks penguatan hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara.²⁰

Meskipun Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengambil sikap sama, bahwa mereka tidak menghendaki satupun dari negar-negara besar, baik Cina, Jepang, maupun Amerika Serikat mendominasi kawasan, dan adalah kepentingan mereka untuk tetap melibatkan negara-negara besar itu dalam hubungan regional yang lebih konstruktif. Dilihat dari segi ini, perubahan-perubahan politik dalam negeri Indonesia yang kemudian memunculkan tuntutan-tuntutan akan perbaikan di bidang ekonomi memberi pembenaran yang kuat pada pemerintah baru Indonesia untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Cina, Jepang, dan India yang berarti melibatkan mereka lebih jauh dalam urusan kawasan, bukan saja dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam bidang keamanan dalam arti luas. Pendekatan baru politik luar negeri Indonesia ini selain dibentuk oleh tekanan-tekanan dari dalam negeri dan perubahan-perubahan yang terjadi di negar-negara di dunia, juga mungkin dibangun atas dasar pemikiran-pemikiran dan cara pandang pembuat kebijakan, yang dalam hal ini Presiden Abdurrahman Wahid.

2.5.2 Politik luar negeri Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Merupakan suatu hal yang lazim dalam setiap perubahan kepemimpinan akan membawa konsekwensi pada perubahan dalam penekanan politik luar negeri. Sebagaimana politik luar negeri Indonesia dibawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid

²⁰ Bantarto Bandoro, 1999, *op. cit.*, hal. 394

yang memberi perhatian lebih besar kepada kekuatan-kekuatan kunci Asia daripada barat, dapat dilihat dalam konteks semangat Indonesia untuk melakukan inovasi dalam hubungan luar negerinya. Banyak yang meyakini ini sebagai komponen baru politik luar negeri Indonesia di era Abdurrahman Wahid, dan ini yang membedakan politik luar negeri Indonesia era Abdurrahman Wahid dan era sebelumnya.

Pada saat serah terima jabatan menteri Luar Negeri Ali Alatas ke Alwi Shihab, Alwi Shihab mengatakan bahwa Politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.²¹ Pernyataan tersebut mungkin didasari oleh asumsi bahwa demokrasi di Indonesia yang mulai tumbuh akan menghasilkan komitmen terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia baik didalam maupun di Luar Negeri. Jadi sebenarnya sudah ada niat dari bangsa Indonesia untuk menggunakan instrumen politik luar negerinya untuk memajukan Hak Asasi Manusia. Pernyataan itu muncul pada saat yang tepat terutama ketika Indonesia sedang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di dalam negeri. Tetapi pernyataan itu juga sebenarnya mengingkari kenyataan bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang terbesar pelanggaran Hak Asasi Manusianya. Oleh karena itu, meskipun memberi visi baru pada politik luar negeri Indonesia, pernyataan itu kelihatannya sulit diterjemahkan dalam diplomasi Hak Asasi.

Meskipun Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia diplomasi Indonesia dalam hal itu belum mampu mengubah pandangan Internasional yang negatif mengenai pelaksanaan Hak Asasi

²¹ *Press Release*, Menteri Luar Negeri pasda acara setrah terima jabatan mentri luar negeri RI dari Ali Alatas kepada Alwi Shihab, 2 November 1999

Manusia di dalam negeri. Selain itu karena Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia terbesar maka sudah tentu Indonesia tidak akan menggunakan isu HAM untuk memajukan sasaran politik luar negerinya, apalagi untuk memajukan hak Asasi di luar negerinya. Dengan demikian diplomasi Hak Asasi yang aktif, dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perubahan-perubahan positif yang kongkrit terhadap situasi HAM diluar negeri. Sebagaimana pernyataan Alwi Shihab bahwa :

” ...para diplomat RI diharapkan bertindak secara proaktif ...dan ... penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia “dan bahwa “... para diplomat RI diharapkan menjelaskan upaya RI dalam menegakkan Hak Asasi Manusia”,

Hal itu bisa ditafsirkan sebagai langkah serius pemerintah Indonesia untuk mengedepankan komponen Hak asasi dalam politik luar negerinya dan mengurangi dampak isu Hak Asasi Manusia dalam hubungan dan negosiasi perdagangan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Tetapi jika dikaitkan dengan respon negatif selama ini terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan sikap Indonesia yang selalu defensif dalam masalah ini, maka sesungguhnya Indonesia berada pada sisi yang sangat terpojok.

Keputusan bagaimana dan kapan Indonesia harus melindungi Hak Asasi Manusia akan menimbulkan persoalan ketika pada saat yang sama Indonesia juga harus menjalankan politik luar negerinya. Indonesia seakan dihadapkan pada pilihan apakah menekankan pada penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dengan mengorbankan hubungan baiknya dengan negara-negara lain, atau memajukan hubungan baik dengan mengorbankan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia.

Persoalannya demikian umumnya dihadapi oleh negara yang memiliki rekor kurang baik dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pernyataan Alwi Shihab tersebut diatas mungkin dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara penghormatan Hak Asasi Manusia dan hubungan bersahabat dengan negara lain. Tetapi kenyataannya bahwa Indonesia memiliki kenyataan yang kurang baik dalam masalah Hak Asasi Manusia, sehingga kurang tepat bila Indonesia menggunakan isu Hak Asasi Manusia untuk memajukan politik luar negerinya.

Meskipun Indonesia mulai mengedepankan komponen Hak Asasi Manusia dalam politik luar negerinya namun, penekanan pada komponen Hak Asasi Manusia hanyalah sebuah strategi simbolik, strategi yang bertujuan hanya untuk menarik perhatian Internasional bahwa proses demokrasi di Indonesia telah dimulai dan diharapkan akan mendorong Indonesia untuk memberi penghormatan yang lebih besar terhadap Hak Asasi Manusia. Harapan realistis Indonesia adalah bahwa kepedulian Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia akan mengurangi tekanan-tekanan yang mungkin dihadapi Indonesia dalam perundingan-perundingan bilateral maupun multilateral.²²

Diplomasi Hak Asasi Manusia yang aktif dan terampil memang dibutuhkan oleh Indonesia untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai konsekwensi dimasukkannya komponen Hak Asasi Manusia dalam politik luar negerinya, maka pemerintahan Abdurrahman Wahid harus mampu dan konsekwen menterjemahkan kebijakan itu secara konkrit. Oleh karena itu, para diplomat Indonesia harus dibekali dedngan pengetahuan yang luas dan ketrampilan untuk

²² Bantarto Bandoro, 1999, *op.cit.* hal. 401

menangani isu-isu nasional dan Internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia .





PERMASALAHAN DALAM NEGERI DAN UPAYA PENYELESAIAN MELALUI KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI OLEH PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

3.1 Krisis Ekonomi Yang Berkepanjangan Dan Komitmen Bantuan Serta Dukungan Luar Negeri

Krisis ekonomi yang melanda sejak paruh kedua Tahun 1997 menimbulkan beban yang sangat berat bagi masyarakat Indonesia yang selama lebih dari tiga decade. Berakhir tumbuh dengan cepat secara tiba-tiba pada Tahun 1998 yang lalu mengalami penurunan yang sangat tajam hingga tumbuh minus 13%¹. Selain terlibat pada penurunan perkembangan ekonomi yang terjadi juga terlihat angka inflasi yang disebabkan kenaikan harga-harga barang hingga mencapai 11% pada akhir 1997 dan mencapai 77,6% pada akhir 1998².

Indonesia yang sebelum krisis telah tergolong negara berpendapatan menengah. Secara tidak terduga terpengaruh dan sempat kembali kepada golongan negara berpenghasilan rendah.

Krisis yang dialami Indonesia pada awalnya merupakan efek penularan (*contagion effect*) dari krisis moneter di Thailand, yang tidak disnatisipasi oleh pemerintah Indonesia. Efek penularan itu terjadi dengan cepat dikarenakan fundamental kehidupan

¹Pande Radja Silalahi, *Agenda Ekonomi Pemerintahan Baru RI*, Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999, No 4 hal 324

² Nadia S. Damajanti, *Strategi ekonomi Indonesia: Mungkinkah Krisis Ekonomi berakhir?*, Jurnal Studi Indonesia .Vol. 18, No.2. 2000,hal. 16

perekonomian Indonesia yang dipenuhi dengan praktek-patek KKN serta kurang transparannya kebijakan-kebijakan pemerintah.

Krisis yang menjatuhkan ekonomi Indonesia tidak terjadi begitu saja. selain karena dampak krisis regional juga disebabkan unsur-unsur ekonomi dalam negeri, yaitu masalah utang luar negeri yang sudah melampaui batas psikologis 100 milyar³. Serta larinya modal asing sebelumnya diinvestasikan di berbagai proyek industri di Indonesia.

3.1.1 Masalah Hutang Luar Negeri

Penumpukan utang luar negeri, khususnya utang swasta telah memberikan beban yang sangat berat bagi pemerintah. Jumlah utang luar negeri pada tahun 1996 adalah 74,6 milyar \$AS, sementara cadangan devisa RI 19,1 milyar \$AS, saat rupiah tertimpa depresiasi, hutang luar negeri melonjak dengan drastis menjadi 102 milyar pada Tahun 1999 dan kembali meningkat pada awal Tahun 2000 menjadi 134 milyar \$ AS. Sedangkan cadangan devisa hanya tercatat 14 milyar \$ AS. Pembayaran hutang luar negeri tersebut memicu berlarut-larutnya krisis. Diperkirakan pada Tahun 1998 devisa yang diperlukan untuk membayar hutang luar negeri tersebut mencapai 36,37 milyar \$ AS terdiri atas utang perusahaan swasta sebesar 27 milyar \$AS, utang perbankan 7-8 milyar dan utang pemerintah sekitar 2 milyar⁴.

Dengan jumlah' utang yang sedemikian besar bahkan diperkirakan setara PDB Indonesia. Maka akan sulit bagi pemerintah

³ Aldysius Gunadi brata, *Modal Asing, Industri dan Kemiskinan* , Atmajaya , yogyakarta, 1999 hal 41

⁴ Zhang Hao, *Indonesias di masa Transisi Analisis CSIS*, Tahun XXVII/19 98 No 4,hal 373

untuk bisa segera keluar dari krisis ini apabila tidak ada tindakan-tindakan yang komprehensif untuk meringankan beban utang luar negeri tersebut.

3.1.2 Masalah Larinya Modal Asing Ke Luar Negeri

Kondisi bangsa yang tidak menentu diakibatkan berbagai konflik yang menjurus kepada aksi-aksi kekerasan terjadi pada awal krisis yang menimpa Indonesia. Sehingga hal ini terlihat pada banyaknya para pemodal asing yang menanamkan investasinya Di Indonesia meras khawatir akan keselamatan dirinya serta modal yang dimilikinya. Sehingga banyak melarikan modalnya ke Luar Negeri. Sehingga terjadilah "*capital flight*" atau pelarian modal. Keluarnya modal yang sangat besar yang mencapai 80 milyar \$ AS⁵. Sempat berpengaruh pada proses industrialisasi di Indonesia. Pelarian modal ke luar negeri oleh para investor merupakan hal yang wajar karena mereka tidak mau mengalami kerugian dimana daerah tempat berinvestasinya tidak memiliki jaminan keamanan serta hukum dan juga kesetabilan politik.

Sebagai upaya penyelesaian krisis yang disebabkan oleh masih diperlukannya modal asing dari luar negeri maka diperlukan usaha-usaha agresif untuk bisa meyakinkan bahwa kondisi bangsa sudah kondusif bagi kegiatan perekonomian. Sehingga munculllah kepercayaan investor kemudian mengalirkan modalnya ke Indonesia.

⁵ A Tony Prasetiantono, *Agenda Ekonomi Pemerintahan Baru*, Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999 No 4 hal 342

3.1.3 Tingginya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat

Fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat tinggi juga sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar paling dirasakan oleh dunia usaha dengan skala industri besar dimana mereka masih harus mendapatkan bahan-bahan produksi industrinya melalui import. Dalam kegiatan Import tersebut mata uang yang digunakan ialah Dollar AS, maka apabila nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat akan menyebabkan sulitnya membeli bahan baku dikarenakan harganya melambung tinggi.

Apabila dunia usaha sudah merasa kesulitan dalam melanjutkan usahanya dikarenakan tidak adanya bahan baku untuk produksi maka ini akan berimbas pada program rasionalisasi karyawannya. Ini merupakan pilihan yang sulit tetapi pihak perusahaan juga tidak ingin usahanya gulung tikar karena harus terbebani oleh pembayaran gaji karyawan. Akibat dari proses rasionalisasi ini tingkat pengangguran akan meningkat, hal ini menjadi permasalahan baru yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah.

3.1.4 Komitmen Bantuan Serta Dukungan Luar Negeri sebagai Hasil Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid

Ketika Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden banyak pihak yang mengharapkan agar krisis ekonomi yang telah menimpa Indonesia sejak tahun 1997 dapat segera diatasi. Kunjungannya ke manca negara tidak terlepas dari keinginan Presiden Abdurrahman

Wahid untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dan politik Indonesia disadari oleh Presiden Abdurrahman Wahid bahwa kredibilitas dan legitimasi pemerintahannya tidak hanya perlu didapat didalam negeri tetapi juga dari luar negeri. Karenanya setiap melakukan perjalanan ke luar negeri Presiden Abdurrahman Wahid hampir selalu mencari kepastian bahwa negara-negara yang dikunjungi mendukung pemerintahannya. Dukungan itu berarti mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dan menolak separatisme di Indonesia. Program pemulihan dibidang ekonomi antara lain menyelesaikan masalah hutang luar negeri dan usaha mengembalikan modal asing yang keluar pada saat awal terjadinya krisis di Indonesia (*Capital Flight*). Visi kebijakan program pemulihan ekonomi didasarkan pada investasi (*equity based recovery*) daripada pemulihan ekonomi didasarkan pinjaman (*loan based recovery*) sebab utang Indonesia sudah sangat besar dan harus dikurangi dengan investasi seluas-luasnya⁶.

* **Penyelesaian Hutang Luar Negeri**

Selain sistem perdagangan bebas negara-negara berkembang juga sering kali mempersoalkan masalah utang luar negeri sebagai penyebab kehancuran ekonomi mereka. Masalah hutang luar negeri yang cenderung membengkak menimbulkan persoalan psikologis tersendiri. Persoalan utang ini semakin bertambah rumit karena adanya perilaku korupsi dan birokrasi yang tidak efisien yang dihadapi oleh mayoritas negara berkembang. Sering pula terjadi

⁶ Tim Peneliti Hubungan Internasional, , *Analisis kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid* , Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta 2001, hal 15

dana pinjaman luar negeri digunakan bukan untuk kegiatan ekonomi yang produktif melainkan digunakan untuk hal-hal yang konsumtif.

Masalah hutang luar negeri juga mendapat perhatian serius dalam diplomasi ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid. Contohnya dalam pertemuan Paris Club II tanggal 12 dan 13 April 2000 Presiden Abdurrahman Wahid berhasil melobi negara-negara maju. Beliau berupaya mengembalikan kepercayaan Internasional terhadap Indonesia. Sebagai akibat dari munculnya rasa kepercayaan tersebut maka pemerintah Indonesia mendapatkan perpanjangan pembayaran utang⁷. Sebenarnya Indonesia tidak layak mendapatkan perpanjangan pembayaran hutang karena lembaga Paris Club hanya melayani negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Namun inilah bentuk kepercayaan dunia Internasional terhadap Indonesia yang pada pertemuan Paris Club tersebut delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden Abdurrahman Wahid

• **Menarik Investasi Asing**

Pelarian modal yang ditanamkan di Indonesia ke luar negeri sewaktu terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, mengguncangkan dunia ekonomi Indonesia karena sumber pembiayaan Industri terbesar di Indonesia merupakan modal asing yang ditanamkan oleh investornya. Dalam perspektif global kedudukan Indonesia Sudah tidak lagi dikatakan sebagai tempat yang menarik untuk kegiatan investasi dan bisnis. Dari sebuah survey yang dilakukan oleh kantor berita *Reuters* dan majalah *Benchmark* yang berbasis di Hongkong terungkap bahwa Indonesia

⁷ *ibid*, hal 150

bukan lagi menjadi pasar di Asia yang paling disukai oleh para *investor* atau *Fund manager* global.⁸

Salah satu agenda penting yang sedang dilakukan oleh pemerintah baru adalah mengusahakan para investor melakukan penanaman modal di Indonesia. Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke beberapa negara di Asia, Amerika, dan Jepang tampaknya berhasil antara lain, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid meyakinkan akan bersifat ramah kepada para pelaku bisnis. Komentar-komentar para pihak asing terhadap langkah-langkah atau tindakan Presiden Abdurrahman Wahid sampai saat ini pada umumnya bersifat positif sehingga diperkirakan arus investasi ke Indonesia akan meningkat secara berarti.

Pujian atas diplomasi ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid tidaklah berlebihan. Dalam pertemuan dengan para pemimpin negara-negara ASEAN, Presiden Abdurrahman Wahid memperoleh banyak komitmen ekonomis dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Komitmen sangat berharga diberikan oleh pemerintah Singapura, lewat Perdana Menteri Goh Chok Tong, pemerintah Singapura akan mendorong para pemodal untuk berbondong-bondong masuk kembali ke Indonesia.⁹

Tapi Presiden Abdurrahman Wahid tidak cepat puas diri. Buktinya, dia ngotot bertandang ke Amerika Serikat meski banyak persoalan dalam negeri memerlukan pemecahan segera. Dalam pertemuannya dengan presiden Bill Clinton, Indonesia sekali lagi memperoleh komitmen bantuan pemulihan ekonomi. Setidaknya,

⁸ *Kompas*, 2 September 2000. Hal.14

⁹ *Jawa pos*, 18 November 1999. Hal.3.

Amerika menjamin bahwa situasi Indonesia aman untuk investasi.¹⁰ Dengan adanya jaminan bahwa Indonesia aman untuk investasi dari Amerika Serikat maka diharapkan tidak ada keraguan dari negara-negara yang lain untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga hal komitmen pemulihan ekonomi dari AS tidak hanya berbentuk material dan modal melainkan juga rasa kepercayaan yang diberikan bagi pemerintah Indonesia.

Sebagai hasil dari kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke luar negeri maka diperoleh peningkatan jumlah penanaman modal asing di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

PENANAMAN MODAL ASING		
TAHUN	JUMLAH PROYEK	NILAI (dalam juta\$)
1997	790	33.832,5
1998	1035	13.563,1
1999	1164	10.890,6
2000	1508	15.413,1
2001	1100	8.979,6

Sumber : BKPM

Dilihat dari nilai investasi yang diilustrasikan oleh tabel diatas maka dapat dilihat selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Akhir 1999 – semester awal 2001) terjadi trend peningkatan Investasi yang masuk ke Indonesia hal ini cukup memberi bukti bahwa dengan kunjungan-kunjungannya Presiden Abdurrahman Wahid mampu meningkatkan kepercayaan dunia Internasional sehingga Investasi juga masuk ke Indonesia. Tapi masuknya Investasi

¹⁰ *Ibid.*

ini masih jauh dibawah terbangnya investasi pada awal krisis dahulu yang mencapai 80 Milyar US\$.

3.2 Gejolak Politik Dalam Negeri Dan Upaya Dukungan Luar Negeri

Kondisi domestik pada awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid memang memberikan beban berat bagi pemerintah. Kondisi domestik yang seharusnya menjadi sumber kekuatan Nasional bagi upaya pencapaian tujuan dari kepentingan nasional mengalami banyak masalah. Sumber kekuatan nasional yang mengalami masalah itu adalah warga negara, banyak sekali gejolak yang dilakukan oleh warga negara dalam menuntut kepentingan mereka. Mereka melakukan tuntutan-tuntutan tersebut karena menganggap sumber kekuatan nasional yang lain yaitu pemerintah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak memberikan hubungan yang saling menguntungkan dengan warga negara. Gejolak-gejolak yang muncul itu antara lain ancaman disintegrasi bangsa, konflik horisontal diantara masyarakat, hubungan yang kurang harmonis antara presiden dan TNI yang juga merupakan unsur kekuatan nasional, serta sorotan dunia Internasional atas pelanggaran HAM di Indonesia.

3.2.1 Disintegrasi Bangsa

Selama pemerintahan orde baru pelaksanaan pembangunan dan penyediaan berbagai fasilitas penunjang pembangunan hanya tersedia di pulau Jawa. Sumber daya yang dimiliki oleh daerah tidak dapat dinikmati hasilnya oleh daerah itu karena harus diberikan kepada pemerintah pusat. Selama pemerintahan orde baru,

kekuasaan daerah dalam segala hal termasuk bidang ekonomi yang hanya 30% sedangkan yang 70% jatuh ketangan pemerintah pusat.

Pembangunan nasional yang masih belum merata dan hanya bertumpu pada Pulau Jawa ini mengakibatkan timbulnya rasa tidak puas dari daerah yang telah diambil sumber kekayaan alamnya secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Tapi daerah sendiri tidak mendapatkan hasil apa-apa. Pemusatan ekonomi yang hanya terbatas pada Pulau Jawa saja, adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan antara pusat dan daerah mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang menyolok antara pusat dan daerah terhadap pemerintahan pusat.

Pada masa Orde Baru penerapan strategi pertumbuhan ekonomi ternyata mempunyai kelemahan-kelemahan yang antara lain pertumbuhan antar sektor tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Tidak adanya pembagian kekuasaan dalam bidang ekonomi secara adil dan merata antara pemerintah pusat dan daerah mengakibatkan timbulnya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, maupun antara daerah yang satu dengan yang lain.

Perimbangan keuangan yang tidak merata antara pusat dan daerah membuat daerah-daerah yang kaya akan sumber kekayaan alam dan dana sebagai zona industri merasa terabaikan oleh pemerintah pusat dan akhirnya menuntut kemerdekaan dari pemerintah pusat.

Daerah Aceh dan Papua merupakan wilayah yang seringkali bergolak akibat konflik yang berkepanjangan dengan pemerintah pusat. Bahwa Aceh dan Papua tidak mengakui sebagai bagian dari wilayah Indonesia karena alasan-alasan historis pada masa

penjajahan dahulu, dan juga ditambah perilaku diskriminatif yang diterima masyarakat Aceh dan Papua. Perilaku diskriminatif dan ketidakadilan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru telah memicu berbagai konflik dan menjadi benih-benih disintegrasi bangsa yang berakar pada ketidakseimbangan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Kesalahan manajemen sosial pada masa Orde Baru menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat daerah karena adanya ketidakadilan pemerintah dalam bidang ekpososbud dan militer. Ketidakadilan yang dirasakan oleh daerah ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Seperti yang terjadi pada wilayah Papua yaitu: antara lain *pertama*, selama 35 tahun bergabung dengan Indonesia terjadi dominasi politik oleh etnis non Irian baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah Irian. Akibatnya peran etnis Irian dalam perencanaan dan formulasi kebijakan mengenai nasib mereka terasa dimarginalkan. Pembinaan aparat birokrasi pemerintah dinilai tak memungkinkan bagi dihasilkannya banyak putra daerah Irian untuk menduduki jabatan penting, baik ditingkat pusat maupun daerah. Akibatnya, banyak jabatan di Irian Jaya baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten lebih diisi orang-orang non Irian. Implikasinya tentu dapat diduga bahwa para mereka akhirnya hanya menghasilkan kebijakan, penyelesaian masalah politik dan sebagainya yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat asli Irian. *Kedua*, selama berintegrasi dengan Indonesia, Irian Jaya hanya merasa dieksploitasi tanpa mendapatkan manfaat yang memadai. Berbagai perusahaan yang hadir di tanah Papua ternyata mengeksploitasi kekayaan alaminya saja dan kurang memperhatikan penduduk asli. *Ketiga*, banyak kebijakan pemerintah yang oleh masyarakat setempat

dinilai sebagai bentuk intervensi kultural yang pada gilirannya justru menimbulkan keresahan sosial. Pada saat yang sama hubungan antara masyarakat terutama dikota besar, juga mengalami ketidakselarasan antara pendatang dengan berpijak pada semangat primordial. Pola seperti ini pada gilirannya menimbulkan efek samping berupa sikap dan pola pikir *inferior-superior* dalam hubungan sosial, terutama yang menyangkut lapangan budaya ataupun status sosial. Selain Orde Baru pemerintahan era Reformasi sedikit banyak juga menjadi faktor pendukung bagi daerah untuk merdeka. Hal ini terkait erat dengan semangat Reformasi yang disertai dengan era keterbukaan yang kemudian melahirkan kekuatan baru bagi daerah untuk menuntut kembali hak-haknya yang telah dirampas oleh pemerintah pusat.

Keinginan Aceh dan Papua untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI mendapatkan perlawanan dari instrumen hankam yang pada jaman Orba kita sebut dengan ABRI dan pada saat ini terbagi menjadi dua yaitu TNI dan POLRI. Pada daerah-daerah rawan konflik di Indonesia ABRI merupakan instrumen yang digunakan pemerintah menjaga stabilitas keamanan nasional, dalam artian memberantas pemberontakan dengan cara-cara militer. Kenyataan yang terjadi di Aceh dengan diberlakukannya DOM, maupun di Irian Jaya dan daerah-daerah rawan konflik lainnya dengan adanya operasi-operasi militer untuk menjamin keutuhan NKRI. ABRI seringkali menggunakan cara-cara kekerasan atas tindakan represif yang memakan korban dari rakyat sipil. Pendekatan keamanan terhadap para pendukung gerakan separatis di Aceh dan Papua serta kaum intelektual yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah, bukan saja menimbulkan trauma yang mendalam bagi

masyarakat Aceh dan Papua melainkan membangkitkan semangat untuk merdeka.

Akibat kekejaman militer yang dilakukan aparat selama DOM mengakibatkan rakyat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan akhirnya mendukung gerakan separatisme GAM dan GPK di Papua. GAM bagi masyarakat Aceh adalah tempat rakyat meminta perlindungan dari kekejaman militer dan tempat rakyat menyampaikan aspirasinya yang tidak tertampung oleh pemerintah. GAM merupakan media rakyat Aceh untuk menyalurkan rasa dendamnya terhadap pemerintah pusat atau militer¹¹.

Penindasan yang dilakukan oleh aparat militer di Papua meliputi beberapa bentuk antara lain intimidasi, teror, penyiksaan dan pembunuhan. Bentuk-bentuk penindasan ini dilakukan berkaitan dengan pengambilalihan hak-hak adat masyarakat Papua atas SDA secara paksa untuk berbagai keperluan. Seperti HPH, transmigrasi, pertambangan, dan industri maupun jasa wisata. Tak berlebihan bila selama berintegrasi dengan Indonesia pembangunan tanah Papua oleh masyarakat lokal justru dinilai sebagai kebijakan yang terencana yang diarahkan memarginalkan peran penduduk asli Papua, seperti tercermin pada operasi militer dan program transmigrasi¹². Selain itu juga dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap militan, memperjuangkan demokrasi, hukum, budaya, dan kemanusiaan termasuk tuntutan kemerdekaan Papua yang terinstitutionalkan pada FPM *free Papua Movement*/OPM (organisasi Papua Merdeka).

¹¹ Aceh, Jakarta, Papua, *Akar permasalahan dan alternatif proses penyelesaian konflik*, YAAPIKA .2001, Jakarta, hal.64.

¹² Dhurorudin Mashad, *Pemisahan Diri VS Otonomi Mencari akar Kemelut Irian Jaya*, Analisis CSIS Tahun XXX/2001, hal, 337

Melihat semakin tingginya intensitas dari beberapa daerah untuk memisahkan diri maka Pemerintah pusat mengharapkan dukungan dari pihak luar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Yang intinya negara-negara luar tidak memberikan dukungan atas keinginan merdekanya beberapa wilayah Indonesia khususnya Aceh dan Papua. Selain mengharapkan dukungan atas kesertaan wilayah NKRI, pemerintah juga berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara internal dengan perundingan maupun perubahan kebijakan-kebijakan yang merugikan daerah.

3.2.2 Konflik Horisontal Diantara Masyarakat Indonesia

Seiring dengan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia, muncul pula gerakan-gerakan yang terjadi diantara masyarakat Indonesia yang kemudian mengakibatkan konflik dan kekerasan sosial. Hal ini terjadi akibat adanya berbagai bentuk kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun budaya. Meningkatnya kesenjangan akan menimbulkan kekerasan atau konflik kolektif dan kultural dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori konflik antar kelompok yang dikemukakan oleh D.O. Sears seorang ahli antropologi sosial, konflik akan terjadi secara kolektif dalam masyarakat karena adanya kesenjangan relatif. Teori ini berkaitan dengan adanya ketidakpuasan dalam kelompok yang tidak hanya timbul dari kesenjangan secara objektif, tetapi juga perasaan kurang secara subjektif yang relatif lebih besar dibandingkan dengan kelompok atau orang lain. Bila seseorang merasa adanya kekurangan dibandingkan dengan kelompok lain, maka mereka akan mengungkapkan kejengkelannya melalui an-organisme kelompok. Kesenjangan ini yang kemudian ditumpangi oleh berbagai isu

primordial seperti perbedaan suku, bangsa, agama, ras, dan antara golongan. Beberapa contoh konflik horisontal yang terjadi di Indonesia antara lain kasus Sambas di Kalimantan, Ambon.

a. Konflik Sambas

Gejala kekerasan sosial sering terjadi di Kalimantan sejak Tahun 1990-an¹³, dan semakin berkembang sejak jatuhnya Soeharto. Seperti kita ketahui penduduk asli Kalimantan adalah orang Dayak dan orang Melayu yang tinggal di pesisir dengan kegiatan bertani di sawah, menangkap ikan dilaut dan bernegara. Kemudian, sebagai konsekuensi dari kemerdekaan Indonesia, khususnya setelah Tahun 1950-an, Kalimantan mulai memasuki struktur sosial yang baru. Sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kalimantan mulai kedatangan migran dari berbagai daerah lain., Khususnya orang Jawa, Bugis, dan Madura. Para migran ini tidak hanya tinggal di kota, tetapi juga merasuk sampai ke desa-desa di pedalaman. Sementara itu, kelompok penduduk pantai Kalimantan seperti orang Banjar dan Melayu, juga bergerak masuk ke daerah pedalaman yang selama ini didominasi oleh orang Dayak. Akibat dan pergerakan penduduk tersebut, struktur sosial berdasarkan etnis dan agama di Kalimantan menjadi berubah. Kota-kota besar dan kecil di Kalimantan berkembang menjadi kota-kota multi-etnis. Dikota-kota besar Kalimantan, seperti Palangkaraya, Pontianak, dan Balikpapan, budaya lokal tidak lagi menjadi budaya yang dominan. Sementara itu, sebagian besar orang Dayak masih hidup terisolasi di hutan pedalaman dengan cara berladang, berpindah. Mereka kurang memperoleh fasilitas pendidikan dan kemudahan lain dari pemerintah.

¹³ Kekerasan sosial di Kalimantan : Sebuah Analisis Antropologi Sosiokultural dalam *ibid*, hal 270

Masuknya penduduk luar khususnya migran Madura membuat penduduk Dayak terdesak secara ekonomi, dikalangan penduduk Kalimantan warga Madura memang terkenal sebagai orang yang ulet, pekerja keras, bertempramen tinggi. Sehingga mengakibatkan kekhawatiran orang Dayak, atas masa depan kedudukan sosial politik dan ekonomi mereka di Kalimantan. Situasi antara orang Dayak dan madura tersebut membuat satu keyakinan bahwa keresahann sosial dari Kalimantan disebabkan perilaku migran Madura yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga menimbulkan akumulasi kecemburuan sosial pada penduduk asli Kalimantan. Akumulasi ini akan meledak apabila dipicu oleh kejadian yang tidak bisa ditolelir lagi oleh warga Dayak, seperti kasus terbunuhnya seseorang atau beberapa orang Dayak akibat pertikaian diantara mereka. Kejadian seperti ini sudah terjadi beberapa kali namun dapat diselesaikan dengan damai. Tetapi akhirnya pihak orang Dayak tidak dapat lagi menahan kesabaran mereka. Akhirnya muncullah pertempuran besar di Sanggau Ledo 1997, Sambas 1999, dan Poso 2001 yang berakibat hilangnya banyak nyawa khususnya dari masyarakat Madura¹⁴.

Fenomena konflik etnis yang terjadi di Kalimantan akan mempengaruhi tingkat keamanan secara Nasional sehingga memperlambat proses *recovery* yang diusahakan pemerintah pusat. Karena konsentrasi pemerintah akan terpecah antara menyelesaikan masalah demi kepentingan Nasional dan konflik horisontal diantara masyarakat.

¹⁴ *ibid.* hal 276

b. Konflik Maluku

Hal serupa dengan yang terjadi di Kalimantan juga terjadi di Maluku yaitu konflik horisontal. Jika di Kalimantan disebabkan konflik etnis, di Ambon disebabkan oleh konflik antar agama. Penduduk Maluku yang beragama Nasrani dan Islam dulunya mampu hidup berdampingan dengan saling menghargai tetapi hanya karena masalah sepele, ataupun masalah tersebut ditumpangi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan isu konflik antar agama.

Bagi tiap orang apabila yang dipermasalahkan adalah agama mereka, maka seperti kata DR.Chusnul Mar'iyah dari UI¹⁵ mereka sudah seperti jerami di musim panas dengan sedikit saja api akan mudah berkobar. Pendapat DR. Chusnul Mar'iyah tersebut terbukti dengan kejadian awal pemicu kerusuhan di Maluku, yaitu pada tanggal 19 Januari 1999. Pada saat itu terjadi pembantaian tak kurang dari 1000 nyawa di kedua belah pihak yang bertikai pemicunya adalah ada seorang warga Ambon yang mayoritas beragama Kristen memeras seorang warga Batu Merah yang mayoritas beragama Islam yang kemudian terjadilah perselisihan diantara mereka yang terus berkembang menjadi kerusuhan di hampir seluruh wilayah Maluku.

Terjadinya kerusuhan di Maluku yang berkepanjangan juga memberikan andil bagi proses perbaikan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Maka pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah yang tepat baik internal maupun eksternal.

¹⁵ Gamma, 9 Januari 2000,hal 28

3.3 Hubungan Presiden Dengan TNI dan Pelanggaran HAM di Indonesia

3.3.1 Hubungan Presiden Dengan TNI

Berdasarkan pernyataan yang terungkap terutama dari kalangan petinggi TNI, mengindikasikan kurang harmonisnya hubungan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan beberapa petinggi TNI. Ada ketegangan yang disebabkan oleh perbedaan pandangan diantara mereka. Beberapa petinggi TNI merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah: *pertama*, terutama atas rencana penanganan pelanggaran HAM, yang menyangkut beberapa petinggi TNI, terutama Jenderal Wiranto yang berakibat dinonaktifkan dari jabatannya sebagai menkopolkam, apalagi rencana penonaktifan itu diumumkan ketika Presiden berada di luar negeri. *Kedua*, yang menolak penerapan darurat militer di Aceh dan pembentukan Kodam baru. *Ketiga*, langkah Presiden yang dianggap mencampuri urusan internal militer. Kekecewaan dan ketidakpuasan yang dialami petinggi militer merupakan sebuah wujud sulitnya beberapa pimpinan militer untuk menerima perubahan-perubahan politik dan pemerintahan di Indonesia, meskipun perubahan itu telah melalui proses mekanisme dan prosedur yang demokratis, serta berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat dominasi militer dalam kehidupan politik, terutama semasa rezim Soehartao, sikap yang ditunjukkan oleh sementara petinggi militer itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Betapa sulitnya mengurus pertahanan dan keamanan dari yang semula mendominasi kehidupan politik. Pernyataan ketidakpuasan petinggi militer itu berkembang

sedemikian rupa termasuk munculnya isu rencana kudeta,¹⁶ meskipun beberapa jenderal membantahnya.¹⁷ Isu kudeta itupun nampaknya juga dikhawatirkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk itulah Presiden memperingatkan kepada para Jenderal untuk tidak berbuat sesuatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam negeri¹⁸.

Persolan kudeta itu telah menjadi polemik. Tetapi berdasarkan ciri pada suasana politik, baik eksternal maupun internal TNI, sulit bagi TNI untuk melakukan kudeta. TNI tidak akan mendapat dukungan rakyat. Sementara itu hubungan Presiden dengan militer yang diakhiri dengan menonaktifkan Menkopolkam Jenderal Wiranto dan penggantian beberapa TNI merupakan petunjuk kuatnya legitimasi Gus Dur. Dan hal ini dilakukan sebagai awal proses kontrol sipil terhadap militer.

3.3.2 Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM di Indonesia sebenarnya bukan isu yang baru tetapi sudah tercatat ribuan kali sejak Tahun 1960-1990. Pelanggaran dikelompokkan menjadi empat tema utama yaitu:

¹⁶ Baca isu kudeta di Harian Suara Merdeka, 23 Januari 2000. Isu Kudeta itu berasal dari Kapuspen Mayjen TNI Sudrajat ketika diwawancarai *The Washington Post*, 1 Januari 2000. Mayjen TNI Sudrajat mengungkapkan hubungan Presiden sedikit bermasalah, ada ketegangan dan sedikit perbedaan pandangan, yang menyangkut kebijakan penerapan darurat militer di Aceh dan pembentukan Kodam baru, karena masalah Aceh semakin ramai dan proses penyelesaiannya belum menampakkan kemajuan yang berarti. Pernyataan Presiden mengenai usaha penyelesaian masalah Aceh itu dipandang TNI sebagai sedikit menyulitkan langkah-langkah penyelesaian yang diambil TNI. Bagaimana mungkin Aceh yang bersenjata tidak diselesaikan dengan operasi militer. Karena itu Mayjen Sudrajat memberikan waktu kepada Presiden sampai pertengahan bulan Januari 2000. Jika tidak setuju TNI akan memulai kudeta secara *formal (take over)*, namun menggunakan modal konstitusional. TNI akan datang ke MPR/DPR untuk meyakinkan mereka bahwa Presiden tidak Legitimate lagi. Jadi kudeta in formal itu dipandang TNI belum menampakkan kemajuan yang berarti.

¹⁷ Baca pengesahan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Ryamizard RC, dalam Harian Suara Karya, 4 Februari 2000. Mengenai isu kudeta itu Pangdam Jaya menegaskan tidak pernah terfikir oleh TNI untuk melakukan kudeta. TNI setia pada bangsa dan negara serta loyal kepada pimpinan.

¹⁸ Baca pengesahan Presiden tentang isu kudeta, *ibid*.

Pertama, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara, hal ini sering terjadi di wilayah tertentu dengan alasan keamanan. Aparat negara melakukan pelanggaran HAM. Dengan argumen baku bahwa mereka melindungi wilayah investasi dari ancaman penduduk lokal. *Kedua*, pelanggaran HAM terjadi sebagai akibat dari kolusi antara aparat pemerintah dengan kalangan pengusaha yang biasanya bergerak dalam bidang pertambangan, kehutanan dan industri. Demi melancarkan kegiatan usaha tersebut para pengusaha meminta aparat melakukan pengamanan dan tidak jarang terjadi pelanggaran HAM. *Ketiga*, Pelanggaran HAM juga kerap dilakukan oleh individu atau kelompok masa terhadap individu atau kelompok massa yang lain dan umumnya dalam bentuk kerusuhan dan konflik massal. *Keempat*, kebebasan-kebebasan publik seorang individu, khususnya kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang pada prakteknya mendapat pengekangan secara luar biasa keras dari pemerintah melalui aparat-aparatnya¹⁹.

Beberapa waktu yang lalu Indonesia mendapat kecaman dari dunia Internasional karena adanya pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan tema pertama seperti disebut diatas. Yaitu sewaktu lepasnya Timor-Timur dari wilayah Indonesia sebagai hasil penentuan pendapat Timor-Timur atas status mereka, tetap bergabung dengan NKRI atau menjadi negara merdeka. Hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Dengan demikian terjadilah kekerasan yang sarat dengan pelanggaran HAM di Timor-Timur. Dunia internasional menyaksikan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Timor-Timur pasca

¹⁹ Landry Haryo Subianto, *Perspektif HAM dalam Diplomasi RI: Tantangan dan Peluang bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid*, Analisis CSIS Tahun XXIX, /2000 0 hal.146.

penentuan pendapat pada akhir Tahun 1999. Pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, serta dalam skala besar dan luas. Berupa pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengungsian paksa, pembumihangusan dan perusakan harta benda yang kesemuanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan²⁰.

Pada kasus Timor-Timur Indonesia dianggap tidak mampu mengendalikan situasi keamanan sehingga terjadi kerusuhan dan mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa serta diikuti dengan arus pengungsian besar-besaran ke wilayah RI. Pelanggaran HAM di kawasan Timor-Timur ini telah menyebabkan citra Indonesia merosot. Demi merubah citra buruk ini maka diperlukan pendekatan-pendekatan secara komprehensif dari pemerintah kepada negara-negara lain yang sangat menjunjung tinggi HAM sehingga Indonesia akan mendapat bantuan usaha menyelesaikan permasalahan ini.

3.4 Dukungan Luar Negeri Terhadap Penyelesaian Gejolak Dalam Negeri

3.4.1 Dukungan Terhadap Integrasi Bangsa

Dalam menyikapi tantangan disintegrasi, pemerintah melakukan berbagai upaya diplomasi yang optimal untuk menggalang dukungan eksternal. Terkait dengan hal ini Presiden Abdurrahman Wahid telah mengambil kebijaksanaan pencegahan melalui diplomasi kepada pihak-pihak luar negeri. Diplomasi melalui kunjungan keluar negeri itu selain dalam rangka kerjasama bilateral

²⁰ Kompas 1 Februari 2002.

juga untuk mengupayakan agar dunia internasional tetap mendukung stabilitas dan integritas wilayah Indonesia.

Dalam kunjungannya ke beberapa negara Presiden Abdurrahman Wahid telah berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara ASEAN, Jepang, RRC, Timur Tengah, dan Eropa, bahwa mereka berkepentingan akan kesatuan perdamaian dan stabilitas Indonesia. Pengakuan dan dukungan atas integritas Indonesia sangat penting bagi kelangsungan Negara kesatuan Republik Indonesia dan diharapkan dapat menghindarkan konflik baru di kawasan regional yang dampak negatifnya dapat merembet ke lingkungan global.

Kita menyadari bahwa Indonesia sedang dibayangi oleh ancaman disintegrasikan. Namun logika demokrasi yang memerlukan suatu keharusan untuk berunding atau berdialog perlu terus dikembangkan agar tidak sampai terjadi kekerasan. Upaya apapun yang mengarah pada disintegrasi bangsa perlu memperhatikan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri oleh PBB masih tetap ada batasannya, yaitu tetap harus mempertahankan integritas negara.²¹

Pernyataan bahwa gerakan separatis adalah salah dan tidak akan mendapatkan dukungan dari dunia internasional ditegaskan oleh sekjen PBB Kofi Annan dalam kunjungannya ke Indonesia pada bulan Februari 2000 lalu. Dalam sambutannya di depan *Indonesiaan council on world Affairs* (ICWA) di Jakarta, 16 Februari 2000, Kofi Annan kembali menegaskan bahwa gerakan separatisme adalah sesuatu yang salah karena memecah satu negara besar menjadi

²¹ Adian Silalahi. "Menyikapi Kecenderungan disintegrasi Indonesia". Dalam *Jurnal Politik Luar Negeri* No. 40 tahun 2001 hal 24.

negara-negara kecil adalah sia-sia.²² Menegaskan bahwa PBB tidak akan mendukung separatisme atau berusaha memecah belah negara besar menjadi negara-negara kecil. Persepsi yang diinginkan oleh PBB adalah bagaimana antara masyarakat ataupun bangsa dapat hidup bersama tanpa konflik²³. Pernyataan serupa juga datang dari Presiden Bill Clinton pada kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dengan mengutip pernyataan Clinton saat bertemu dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, tanggal 12 November 1999²⁴. Dalam keterangannya, Clinton menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung wilayah integral Indonesia yang sah. Hal senada juga disampaikan oleh negara-negara anggota ASEAN. Alasan utama bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk tidak mendukung gerakan separatisme adalah karena adanya kekhawatiran bahwa Asia Tenggara akan terjerumus dalam keketidakstabilan politik apabila Indonesia mengizinkan Aceh dan daerah rawan lainnya untuk memisahkan diri.²⁵

Dukungan dari para pemimpin negara-negara ASEAN antar lain ditunjukkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad di Kuala Lumpur sewaktu menerima kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid yang intinya pemerintahan Malaysia tidak membantu aktifitas separatis GAM yang selama ini dicurigai banyak dijalankan melalui pekerja imigran asal Aceh. Selain itu Filipina juga memberi dukungan terhadap keutuhan wilayah Indonesia dikarenakan adanya ketakutan terhadap ketidakstabilan regional

²² *Kompas*, 17 Februari 2000.

²³ Adian silalahi. *op.cit.* hal.25

²⁴ *Antara*, 15 November 1999.

²⁵ *Suara Karya*, 12 November 1999.

akibat pecahnya negara terbesar tetangganya yaitu Indonesia. Selain kedua negara tersebut negara-negara yang lain seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam juga memberi dukungan yang serupa.

Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid selanjutnya kenegara Papua New Guinea negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung dengan Irian Jaya. Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh dukungan pihak Internasional dan Papua New Guinea terhadap Irian Jaya yang hendak memisahkan diri dan hasilnya pemerintah Papua New Guinea menyatakan dukungannya bagi kedaulatan republik Indonesia atas wilayah Irian Jaya yang sedang bergolak. Sikap pemerintah Papua New Guinea setelah kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ternyata cukup serius untuk membantu Indonesia hal ini terbukti dengan adanya peningkatan patroli disepanjang wilayah perbatasan Papua New Guinea dengan Indonesia. Patroli ini akan mencegah masuknya penduduk Irian Jaya yang masuk ke Papua New Guinea dikarenakan ingin memberontak terhadap Indonesia²⁶.

Pemerintah Australiapun yang dicurigai memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Irian Jaya juga telah menginformasikan bahwa tidak benar jika Australia mendukung pemisahan Irian Jaya hal ini terungkap pada pertemuan pimpinan Asia Pasifik (AELM) pada 15-16 November 2000 di Brunai Darusalam, Perdana Menteri Australia John Howard dan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark menyatakan bahwa wilayah Irian Jaya adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia.²⁷ Penegasan sikap yang

²⁶ Tim Peneliti Hubungan Internasional Indonesia, *loc.cit.* hal.24.

²⁷ Australia dan Selandia Baru dukung integritas RI, *Kompas* 16 November 2000 hal 21.

disampaikan oleh Perdana menteri Howard juga merupakan bagian dari isi *position paper* mengenai sikap Canberra terhadap Indonesia terutama dalam kaitannya dengan integritas teritorial di Indonesia²⁸.

Banyaknya dukungan atas integritas wilayah RI dari negara-negara lain menunjukkan bahwa perjalanan diplomatik Presiden Abdurrahman Wahid memperoleh hasil yang konstruktif bagi kehidupan berbangsa karena dukungan internasional merupakan modal dasar bagi penyelesaian masalah integrasi di Indonesia.

3.4.2 Hubungan Presiden Dengan Militer Dan Proses Demokratisasi Indonesia

Melihat adanya hubungan yang kurang harmonis dengan militer dikarenakan beredarnya isu kudeta diawal pemerintahannya maka Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri antara lain ke Amerika Serikat dan Eropa untuk menggalang dukungan dari negara-negara maju yang selama ini memberikan perhatian pada proses demokratisasi di Indonesia. Proses demokratisasi dalam suatu negara tidak akan terwujud apabila pihak militer masih memberikan pengaruh pada proses pengambilan kebijakan respon yang diperoleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal ini dapat dikatakan sangat positif sebab dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan berbagai pimpinan resmi negara-negara maju di Amerika Serikat dan Eropa mereka menyambut gembira langkah demokratisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia²⁹.

²⁸ Howard dukung integritas teritorial Indonesia, *Media Indonesia*, 16 November 2000.

²⁹ UE akan cabut embargo terhadap RI: staf kongres AS kunjungi yogyakarta dan Bali *Media Indonesia*, 15 Januari 2000 hal: 1.

Kunjungan tersebut ditindak lanjuti dengan pembenahan bentuk kerjasama militer dengan Indonesia yang menekankan pentingnya pemahaman secara mendalam atas pemerintahan dibawah supremasi sipil. Hasil yang nyata secara politik dari kunjungan-kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke negara-negara maju tersebut adalah komitmen yang diperolehnya untuk terus melakukan pembenahan-pembenahan dalam tubuh militer seperti halnya pemisahan polisi dari militer, mengakhiri keterlibatan militer dalam parlemen secepatnya dan mengusut kasus-kasus pelanggaran berat HAM oleh militer di masa lalu. Sebagaimana diinformasikan oleh pihak Amerika Serikat pemerintah AS, melalui lembaga internasionalnya, USAID secara khusus telah menyediakan anggaran untuk mendukung program demokratisasi Indonesia. Ini belum termasuk anggaran yang dikeluarkan LSM-LSM di Amerika Serikat untuk program studi banding, pelatihan, lokakarya, seminar, dan penyediaan material untuk pendidikan dan penerangan mengenai pengembangan demokrasi, perwujudan masyarakat sipil yang kuat dan pembentukan profesionalisme militer³⁰. Dipihak lain negara-negara seperti Inggris dan Swedia baik melalui pemerintahan resmi mereka seperti *Foreign Commonwealth Office* (FCO) atau Departemen Luar Negeri maupun LSM seperti *The British Council*, *IFIS (International Foundation For Election Systems)* dan *IDEA (Institute For Democracy Assistance)* banyak kalangan dari pemerintah apakah itu pegawai pemerintah, birokrat, pelayan masyarakat, ataupun akademisi, serta swasta seperti pekerja LSM

³⁰ *Demokrasi masih Hadapi Ancaman: AS akan bantu Indonesia mempertahankannya*, Media Indonesia 20 Januari 2000, hal: 1.

dan wartawan telah memperoleh pendidikan dan latihan dari mereka di Indonesia atau di negara-negara mereka masing-masing.

Pada dasarnya dukungan internasional untuk reformasi total dalam tubuh militer yang artinya juga untuk langkah demokratisasi, secara lebih luas telah berhasil diperoleh Presiden Abdurrahman Wahid meskipun banyak yang menganggap hal itu hanya sebatas dukungan saja.

3.4.3 Hasil Bagi Penegakan Hak Asasi Manusia

Kunjungan-kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid keluar negeri juga mengandung agenda sosialisai penegakkan hak asasi manusia di Indonesia, meskipun masalah HAM bukanlah isu yang baru dalam keidupan berbangsa kita. Perhatian dunia luar terhadap pelanggaran HAM di Indonesia menjadi sangat serius ketika terjadi kerusuhan dan pembumi hangusan kota-kota di Timor-Timur pasca jejak pendapat penentuan kemerdekaan. Sebenarnya masalah HAM telah lama menjadi sorotan pihak internasional karena tercatat sejak Tahun 1960-an sampai dengan Tahun 1990-an terdapat ribuan kasus pelanggaran HAM dengan beberapa tema antar lain: pelanggaran HAM oleh militer, pelanggaran akibat konflik horisontal dan pelanggaran HAM akibat pelanggaran hak individu³¹. Dari perspektif penegakkan HAM, jika dikaji lebih mendalam, rangkaian kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke mancanegara, terutama ke negara-negara barat, selain untuk memperoleh dukungan Internasional secara langsung dari para pemimpin negara-negara yang dikunjunginya, disisi lain sebenarnya juga dilakukan dalam dalam upaya menumbuhkan kepercayaan dunia Internasional

³¹ Landry Haryo Subianto, *Perspektif HAM Dalam Diplomasi Ri: Tantangan Dan Peluang Bagi Pemerintahan# Abdurrahman Wahid*, Analisis CSIS, Tahun XXIX/2000 No 2 hal 146

terhadap pengimplementasian hukum Nasional oleh aparat hukum negeri sendiri (Indonesia)³²

Sejak awal pihak militerlah yang menjadi sasaran upaya penegakkan HAM di Indonesia . Upaya mengusut pelanggaran HAM oleh militer merupakan hal yang sangat sensitif dan menimbulkan perlawanan tinggi terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, karena mereka yang diduga terlibat masih memiliki kekuasaan atau pengaruh. Sehingga, untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan membawa pelakunya ke pengadilan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membutuhkan dukungan, baik secara moral maupun material, dalam bentuk data, Advokasi hukum dan sebagainya, dari negara-negara besar yang selama ini berpengalaman dalam mengungkap kasus pelanggaran dan kejahatan HAM berat. Tekanan Internasional yang intensif, karenanya menjadi faktor pendukung bagi pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM untuk memenuhi tuntutan keadilan masyarakat yang selama ini dikesampingkan³³.

Selain hal itu kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke luar negeri dalam rangka upaya mencari dukungan dalam penegakkan HAM di Indonesia juga bertujuan untuk mencari dukungan masyarakat Internasional terhadap para putra bangsa pelanggar HAM berat untuk tidak diadili di peradilan Internasional selain itu Amerika Serikat juga telah mulai melonggarkan embargo militernya

³² Tim Peneliti Hubungan Internasional, *Analisis kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid*, Pusat pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta 2001, hal 15

³³PM. Italia Massimo DiAtema : *Kudeta Akan kucilkan militer Indonesia*, Suara Pembaharuan 5 Februari 2000, hal 1

dengan mencabut larangan kerjasama bilateral militer dan penjualan senjata militer ke Indonesia.

Demi perbaikan kondisi HAM di Indonesia pihak Amerika Serikat memberikan pendidikan dan latihan (*training*) untuk militer Indonesia, selain itu juga pendekatan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap pemerintah Amerika Serikat juga berhasil melunakkan sikap Amerika Serikat yang semula hendak menjatuhkan sanksi ekonomi akibat ketidakseriusan Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jejak pendapat³⁴

³⁴ Tim peneliti hubungan Internasional, *op.cit* hal.59

BAB V
KESIMPULAN

Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam Politik Luar Negerinya menekankan kebijakan pada; pemulihan citra Indonesia di masyarakat Internasional, pemulihan ekonomi nasional, pemeliharaan keutuhan wilayah Nasional serta peningkatan hubungan bilateral dengan memprioritaskan pada negara-negara yang dapat membatu percepatan perekonomian kita. Untuk menjalankan politik luar negeri tersebut Presiden memakai instrumen diplomasi, dengan melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri dengan berbagai agenda dan bertujuan demi kepentingan nasional di dunia Internasional.

Dari fakta-fakta hasil kunjungan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid Ke Luar Negeri, pengaruhnya bagi upaya penyelesaian permasalahan politik dan ekonomi yang menimpa Indonesia ternyata kurang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh, hal ini dikarenakan kebijakan yang ditempuh Presiden ini hasilnya tidak bisa meyentuh ke akar permasalahan yang sedang dihadapi bangsa. Komitmen bantuan dan dukungan asing ternyata hanya bermanfaat bagi pemerintahan Abdurrahman Wahid yaitu sebagai bentuk legitimasi pihak asing terhadap pemerintahan baru di Indonesia. Selain itu seringkali kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Keluar negeri juga mengakibatkan dampak yang kurang baik yaitu akan mengakibatkan pemborosan bagi anggaran biaya perjalanan Presiden selain itu, Presiden juga akan menghadapi tekanan dari dalam negeri karena Presiden dianggap tidak mempunyai *sense of crisis* terhadap kondisi yang dihadapi oleh dalam negeri.

Tidak selesainya permasalahan yang dialami bangsa pasca kunjungan, semakin mempertipis bekal legitimasi domestik yang dimiliki Presiden Abdurrahman Wahid, dengan menipisnya legitimasi tersebut maka jabatannya pun akan semakin mudah digantikan melalui proses yang konstitusional dalam lembaga perwakilan rakyat

Tetapi meskipun dirasa kurang signifikan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa secara menyeluruh kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ke Luar negeri paling tidak telah meninggalkan jejak bagi politik luar negeri Indonesia sehingga dikemudian hari akan bisa mempermudah hubungan yang berkaitan dengan negara-negara di dunia, dalam konteks hubungan bilateral.

Dengan adanya dukungan baik berupa materi maupun dukungan moral akan sangat bermanfaat bagi proses penyelesaian krisis di Indonesia. Penyelesaian krisis ini tidak mungkin akan berlangsung dengan cepat dengan kata lain krisis akan berlalu seusai Presiden Abdurrahman Wahid melakukan kunjungannya ke luar negeri, tapi hal ini memerlukan proses yang panjang, juga memerlukan dukungan dari segenap rakyat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Arif (ed), Islam Demokrasi atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan umat model Gus Dur dan Amien Rais, Pustaka Pelajar Jogjakarta, 1997
- Al Brebesi, Ma'mun Murod, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara, Raja Grafindo Persada, 1999
- Badri, Jusuf, Kiat Diplomasi: Mekanisme dan Pelaksanaanya , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Barton, Greg, Gagasan Islam Liberal di Indonesia, Pustaka Antara, Jakarta, 1997
- Falley, Greg dan Greg Barton, Tradisionalisme Radikal : Persinggungan NU-Negara, LKiS, Jogjakarta, 1997
- Gunadi Brata, Aldysius, Modal Asing , Industri dan Kemiskinan, Atmajaya, Jogjakarta, 1999
- Hadi, Sutrisno, Metode Riset jilid I, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 1986
- Holsti, K.J, Politik Internasional : Kerangka Untuk Analisis, Erlangga, Jakarta, 1988
- Kartono, Kartini, Pengantar Metodologi Research, Rajawali Press, Jakarta, 1981
- Kusumohamidjojo, Budiono, Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis, Bina Cipta, Bandung , 1987
- Maso'ed, Mohtar, Studi Hubungan Internasional ; Tingkat Analisa dan Teorisasi, PAU-UGM, Jogjakarta, 1989
-, Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1994
- Masdar, Umarudin, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999

- Morgenthau, Hans.J, Politik Antar Bangsa (buku ke tiga), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995
- Pareira, Andre H, Perubahan Global &Perkembangan Studi Hubungan Internasional, PACIS, Bandung, 1999
- Plano, Jack.C, Kamus Analisa Politik, CV. Rajawali Press, Jakarta, 1982
- Rais, Amien, Politik Internasional Dewasa Ini, Usaha Nasional, Surabaya, 1989
- Roy, S.L, Diplomasi, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995
- Sudarsono, Juwono *et,al* , Perkembangan Studi Hubungan Internasional Dan Tantangan Masa Depan, Pustaka Jaya, Jakarta , 1996
- Surakhmat, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tekhnik, Tarsito, Bandung, 1982
- Suriasumantri, Jujun.S, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Sobary, Mohamad dkk (ed), Gus Dur di Istana Rakyat, Catatan Tahun Pertama, LKBN Antara- Bright Communication, Jakarta, 2000
- Tim Peneliti Hubungan Internasional, Analisis Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta, 2001
- Yusuf, Sufri, Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian tentang Pelaksanaanya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Zeda, Khamami (ed), Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan, LAKPESDAM, Jakarta, 2002

JURNAL

ANALISIS CSIS, Tahun XXVII, No. 4, 1998

....., Tahun XXVIII, No. 3, 1999

....., No. 4, 1999

....., Tahun XXIX, No. 2, 2000

....., Tahun XXX, No. 3, 2001

Jurnal Studi Indonesia, Volume 18, No. 2, 2000

Jurnal Politik Luar Negeri, No. 40, 2000

SURAT KABAR DAN MAJALAH

Jawa Pos, 17 Agustus 2001

Tekad, 26 Juli – 1 Agustus 1999

Suara Merdeka, 23 Januari 2000

Suara Karya, 4 Februari 2000

....., 12 November 1999

Kompas, 26 November 1999

....., 31 Agustus 1999

....., 17 Februari 2000

....., 1 Maret 2000

....., 18 April 2000

....., 2 September 2000

....., 16 November 2000

....., 16 Januari 2001

....., 26 Juni 2001

....., 1 Juli 2001

....., 1 Februari 2002

Media Indonesia, 15 Januari 2000

....., 20 Januari 2000

....., 16 November 2000

....., 9 November 1999

Suara Pembaruan, 5 Februari 2000

....., 6 Februari 2000

....., 26 Oktober 1999

Bisnis Indonesia, 3 Desember 1999

Antara, 15 November 1999

GAMMA, 4 Januari 2000

SITUS INTERNET

The Indonesian Foreign Policy Outlook : Sambutan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. (<http://www.deplu.go.id>)

Kalau Gus Dur hampir habis peruntukan Dr Mahatir ?.
(<http://www.detik.com>)

"The Indonesian Foreign Policy Outlook"

Keynote Address by

H.E. Dr. Aiwi Shihab

Minister for Foreign Affairs

Republic of Indonesia

At the Conference in Observance of

The Indonesian National Press Day,

The Silver Jubilee of

The Confederation of ASEAN Journalists And the 54th Anniversary of the PWI

Jakarta, 17 February 2000

Excellencies,

Distinguished Participants,

Ladies and Gentlemen,

I am greatly pleased and honoured to be able to join you at this Conference in observance of the Indonesian National Press Day, the Silver Jubilee of the Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) and the 54th Anniversary of the Indonesian Journalists' Association (PWI). It is auspicious that this Conference takes place as Indonesia is moving towards genuine democracy, a stage in our national life in which the press plays a vital role. I therefore commend the CAJ and the PWI for holding this Conference.

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

Of all the East Asian countries that were severely hit by the Asian financial crisis, Indonesia suffered the most, being the only country that also sustained a major political crisis and social upheaval as a consequence of this debacle. Moreover, our credibility to our economic partners was undermined. Unemployment and poverty were rampant while economic growth plummeted from an average of seven percent during the years before the crisis to 4.6 percent in 1997, to minus 13.6 percent the following year. Indeed, the financial crisis led to a three-fold crisis in Indonesia economic, social and political. This created many multidimensional problems, which the present democratically elected Government inherited. Today we must also face the reality of ethnic and religious strife in some parts of the country. These problems have to be addressed promptly and carefully.

We are therefore determined to restore and maintain political stability and put the economy back on track to steady and sustainable growth as quickly as possible. For this purpose, the Government has taken steps to sustain macro economic stability, strengthen the banking sector, restructure corporate debts and pursue structural reforms. Thereby we hope to transform our high-cost economy into a more efficient and competitive one.

We are revitalizing production and improving the business environment by promoting openness and transparency in the public sector and in the management of business. The Government, propelled to office by the people's demand for good governance, has taken vigorous measures to reduce, if not eliminate, corruption, collusion and nepotism and to improve the efficiency and transparency of public administration.

For we have learned a valuable lesson from our experience of recent years: that economic recovery is not possible without a restoration of the confidence of the international as well as national business communities. We must therefore maintain political stability and the momentum of our peaceful transition to a fully democratic system. And in this era of interdependence, we also need the support and assistance of the international community.

To gain that support, we had to restore the good image that Indonesia lost in the aftermath of social upheavals during the crisis. That is why in the span of less than four months since he took office, President Abdurrahman Wahid undertook a diplomatic initiative that took him to 26 countries in order to rebuild the good image of Indonesia in the eyes of the international community; to restore confidence in Indonesia among the business circles of the countries visited; to directly invite

Digital Repository Universitas Jember

foreign investments; and to convince the international community that Indonesia had the capability and determination to deal with the issue of human rights and that an international tribunal to try cases of human rights violations was therefore unnecessary.

Although there may still be sceptics who are unconvinced about Indonesia's economic recovery, financial and economic indicators in the past several months have been very encouraging. The Asian Development Bank has projected an economic growth of four percent for Indonesia in the year 2000, while the World Bank, in a recent report, forecast a growth of 3.4 percent in the year 2000 and five percent in 2001. We therefore feel that the tide is beginning to turn in our favour. But we still have to contend with powerful external forces and the impact of globalization. It is true that globalization and liberalization, when managed wisely by the international community, can open up vast opportunities for accelerating development and enlarging prosperity everywhere. On the other hand, the economic turmoil that befell Indonesia and other East Asian economies during the past two years gave us a poignant sample of the devastation that the force of globalization and liberalization can inflict when allowed to rampage freely.

Our foreign policy, therefore, must be geared to the realities of our economic situation, including the actualities of globalization and interdependence. Indonesia's independent and active foreign policy as enshrined in our constitution and in the consciousness of our people, remains unchanged. But we must adapt as we adapted in previous times.

It may be recalled that during the years immediately following the proclamation of our independence, our foreign policy was aimed at gaining international recognition of our sovereignty and supporting the global struggle against colonialism. Thereafter, during the 'New Order' period, Indonesia's foreign policy was dedicated to national development and pursuing active participation in an array of international fora. Today, in an era of reform, Indonesia's foreign policy is aimed at supporting economic recovery and promoting democratization.

We have therefore enjoined our missions overseas to build commercial networks and open up markets for Indonesian products and services. Our embassies and consulates stand ready to assist Indonesians participating in international trade fairs, business fora, as well as investment and tourism promotion activities. They are also called upon to communicate to audiences abroad the merits and potentials of Indonesia as an investment area and trading partner. They must all serve as service and information centres providing a steady flow of up-to-date and reliable information on economic indicators in Indonesia.

To be able to do all these, our diplomats must enhance their marketing and communication skills. The Department of Foreign Affairs is therefore reinforcing its diplomatic training system through cooperative arrangements with the appropriate educational and training institutions. Ultimately, our diplomats will be promoting the national interest abroad by serving as agents of trade, investment and other forms of economic cooperation.

As to reshaping the external environment for Indonesia's economic recovery, we have to be realistic about what our diplomacy can achieve. We cannot possibly attend to the entire international agenda—that would be too large for us. We must concentrate on a number of priorities dictated by our national interest.

First, we will remain closely engaged with the region in which we live: Southeast Asia, which we also call the ASEAN region. We will continue to foster regional stability and cooperation so that ASEAN remains united, independent and free from the interference of external powers. Indonesia worked hard for the attainment of ASEAN-Ten. We have always upheld the idea of an ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). We will contribute all we can to promote wide acceptance and support for the two treaties directly based on ZOPFAN: the Treaty of Amity and Cooperation (TAC) in Southeast Asia and the Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ).

As you know, ZOPFAN embodies a set of principles and policy guidelines that would serve as a code of conduct governing relations among the states within and outside

the Zone. If all the powers concerned will adhere to the principles of ZOPFAN, the ASEAN region is assured that there will be no external interventions in its internal affairs and will eventually develop a capacity and a way of solving disputes involving its members.

As a matter of course, Indonesia continues to participate vigorously in the ASEAN endeavours to realize AFTA, the ASEAN Investment Area and other measures to ensure that ASEAN can attract investment and trading partners.

In the larger Asia-Pacific region, Indonesia and the rest of the ASEAN family will remain engaged in two vital processes: the ASEAN Regional Forum (ARF) in the political-security field and APEC in the economic field.

The ARF process is important to Indonesia because of the transparency, mutual trust and confidence on military and security matters that it promotes for the entire Pacific. These are essential ingredients to long-term peace in the region, without which economic recovery, not to mention long-term prosperity, would not be possible.

From an economic perspective, APEC has also become vitally important to us. Indonesia's exports to APEC members account for 77 percent of our total exports and are continuing to grow at the rate of 12 percent per annum. At the same time, our imports from other APEC members amount to 69 percent of our total imports. In similar fashion, the flow of Foreign Direct Investment (FDI) to Indonesia from other APEC members has steadily increased. According to a recent study, seven out of the ten most preferred emerging-market investment locations in the world are located within APEC, and one of the seven is Indonesia. APEC has been good for Indonesia and we hope to continue contributing to the advancement of the APEC process.

In order to stay strongly in the global market and as a way of balancing its foreign policy, Indonesia seeks to develop a strategic partnership with China, India and Russia. This will be achieved without sacrificing our existing excellent relations with Western countries.

Indonesia's participation in international fora such as the Non-Aligned Movement (NAM), the Group of 77 and China, the Organization of the Islamic Conference (OIC), the Group of 15 as well as the Developing 8 is not only in line with its "independent and active" foreign policy, but also reflects its solidarity with other Third World countries. Indonesia is also actively participating in the Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation (IOR-ARC), which has great potential for export promotion among its members. We have also joined the East Asia and Latin America Forum (EALAF), which could foster growth of trade and cooperation in various other fields between countries of East Asia and Latin America.

We are maintaining our active participation in the work of the United Nations as well as international fora dealing with crucial global economic issues. We believe that in order to minimize the risks posed by globalization and liberalization, international cooperation based on the principle of shared responsibility, mutual benefits and genuine partnership should be strengthened. As president of the UN Economic and Social Council (ECOSOC) in the year 2000, Indonesia has the opportunity to promote both the North-South dialogue and South-South cooperation. The Council is now playing a pivotal role in the efforts of developing countries to cope with the impact of globalization and liberalization. We will certainly endeavour to enhance the effectiveness of the Council in the course of the restructuring of the United Nations. In the field of peace and security, Indonesia has called for a greater role for the United Nations General Assembly as the only universal forum where all states are represented. To rectify the imbalance in the Security Council, we will continue advocating for an increase in both its permanent and non-permanent memberships to make it more democratic, legitimate and reflective of today's geopolitical realities. To promote better understanding among religions, Indonesia, in co-operation with UNESCO, will convene next month "The First Meeting of the International Advisory Committee for the Inter-Religious Dialogue."

As to East Timor, it has now separated from Indonesia and is under the administration and responsibility of the United Nations Transitional Administration in

Digital Repository Universitas Jember

East Timor (UNTAET). The United Nations General Assembly has brought to a close the consideration of the "Question of East Timor" in its agenda through a resolution adopted in December 1999. We have accordingly made a policy adjustment by which we commit ourselves to nurturing good relations with East Timor. We wish to see reconciliation amongst the East Timorese take place under the supervision of UNTAET. We sincerely hope that East Timor will develop into a stable and peaceful nation. President Abdurrahman Wahid expressed this sentiment when he met a delegation of the CNRT led by Mr. Jose Alexandre Gusmao and a group of pro-integration East Timorese on 20 November 1999. He urged the rival factions to reconcile and work together for a better future for the East Timorese people.

Ten days from now, President Wahid will visit Dili where he will inaugurate the Office of Indonesian Interests (KUKRI). This visit reflects Indonesia's gesture to maintain good and friendly relations with East Timor.

Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

In this era of globalization and high technology, the conduct of foreign policy requires more than ever before a great capacity for effective communication to audiences at home and abroad. There is so much to tell about the aspirations and needs of the Indonesian people, about the efforts of this Government to meet those needs and fulfil those aspirations and what our friends can do to help us as well as what we can do for them in return. The constructive initiatives that have been taken, the support that they require, the opportunities that they have opened up all these must be conveyed clearly.

In the reporting of these realities to those who need to know about them, the role of the mass media and the press is critical. We therefore look upon a free, independent, responsible and enterprising press as a gadfly and partner in that great and worthy endeavour.

Thank you.

Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

Foreign Minister Mr. Alwi Shihab deeply regrets for not able to personally come to deliver his speech at this conference this afternoon. He was asked by the President to accompany him for another function. At the last minute the Minister asked me to represent him to read his written address.

For that reason, I will not be ready for dialog because the Minister did not give me any mandate to answer any questions you may have.

Now, allow me to read the Minister's written speech as follows:

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia



No. 13/PR/III/01

PEMERINTAH JEPANG MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA INDONESIA

Pemerintah Jepang telah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia sebesar Yen 99,17 milyar (US\$ 806,1 juta) yang terbagi dalam *Ordinary Yen Loan* sebesar Yen 58,13 milyar dan *Special Yen Loan* sebesar Yen 41,03 milyar. Bantuan *Ordinary Yen Loan* tersebut merupakan realisasi dari janji Pemerintah Jepang pada pertemuan CGO di Tokyo bulan Oktober 2000, sedangkan *Special Yen Loan* merupakan komitmen Jepang kepada Indonesia bulan November 2000.

Bantuan *Ordinary Yen Loan* akan digunakan untuk membiayai 5 proyek, yaitu:

1. *Batanghari Irrigation Project (II)* (Yen 7,639 milyar)
2. *Project Type Sector Loan for Water Resource Development (II)* (Yen 18,676 milyar)
3. *Rural Areas Infrastructure Development Project (III)* (Yen 20,039 milyar)
4. *Institutional and Human Resource Development for IT-related Customs Services Improvement Project* (Yen 4,108 milyar)
5. *Maritime Education and Training Improvement Project* (Yen 7,669 milyar)

Ordinary Yen Loan bagi proyek-proyek nomor 1 sampai nomor 4 mempunyai persyaratan pembayaran kembali 30 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun dengan bunga tahunan sebesar 1,8%. Sedangkan untuk nomor 5 mempunyai persyaratan antara lain pembayaran kembali 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun dengan bunga tahunan sebesar 0,75%.

Sementara *Special Yen Loan* akan digunakan untuk proyek *Railway Electrification and Double-Double Tracking of Java Main Line Project* dengan masa pembayaran kembali 40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun dengan bunga tahunan sebesar 0,95%.

Pemberian pinjaman tersebut tercantum dalam Naskah Pertukaran Nota dan *Record of Discussions* yang ditandatangani hari ini, 30 Maret, di Gedung Pancasila, Deplu oleh Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Deplu, Dr. Makarim Wibisono dan Duta Besar Jepang di Jakarta, Yukio Takeuchi.

Jakarta, 30 Maret 2001

No. 029/PR/VI/01

Penandatanganan Pertukaran Nota mengenai Penjadwalan kembali hutang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jepang

Pada hari Jumat 29 Juni 2001 bertempat di Departemen Luar Negeri, Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Dr. Makarim Wibisono dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Y.M. Yukio Takeuchi atas nama pemerintah masing-masing telah menandatangani 3 (tiga) naskah Pertukaran Nota dan *Record of Discussions* mengenai Penjadwalan kembali Hutang Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jepang sejumlah Yen 304.252.261.137 dan US\$ 68.805.210.

Hutang-hutang yang dijadwalkan adalah hutang-hutang untuk pinjaman pembelian beras (BULOG), pinjaman komersial dan pinjaman (OECD/IBIC dan JEXIM) dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Hutang kepada OECD (IBIC) dan EXIM
berupa "Unsecured Loan" and "Buyer's Credit" | Yen 271.023.864.380
US\$ 68.805.210 |
| 2. Hutang pembelian beras (BULOG) | Yen 7.252.245.722 |
| 3. Hutang Komersial | Yen 25.976.151.035 |

Perlunya penjadwalan kembali hutang luar negeri Pemerintah RI kepada Pemerintah Jepang tersebut adalah dalam upaya untuk mengatasi beban keuangan negara yang semakin berat dan meningkatnya defisit neraca pembayaran Indonesia. Jumlah keseluruhan hutang Indonesia yang diminta untuk dijadwalkan kembali mencapai US\$ 5,7 milyar. Sementara itu, jumlah hutang Indonesia kepada Jepang yang dijadwalkan kembali mencapai US\$ 2,8 milyar atau 49,12 persen dari keseluruhan jumlah hutang yang dijadwalkan kembali.

Pertukaran Nota mengenai Penjadwalan Kembali Hutang tersebut merupakan realisasi dari Sidang Paris Club II yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 12-13 April 2000, antara pemerintah RI dengan negara-negara kreditor. Dalam Sidang Paris Club tersebut antara lain disepakati bahwa hutang-hutang yang dapat dijadwalkan kembali adalah pinjaman lunak (*Official Development Assistance/ODA*) dan pinjaman non-ODA yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Juli 1997 serta pinjaman yang jatuh tempo antara tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Maret 2001 untuk periode 15 sampai 20 tahun.

Jakarta, 29 Juni 2001



Jepang Beri Hibah Senilai Yen 2,008 milyar (Rp. 186,6 milyar)

Pemerintah Jepang untuk ketiga kalinya dalam tahun ini memberikan bantuan hibah kepada Indonesia senilai Yen 2,008 milyar, atau sekitar Rp 186,6 milyar.

Hal ini tercantum dalam naskah Pertukaran Nota dan "Record of Discussion" yang ditandatangani Dirjen HELN Dr. Makarim Wibisono dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yukio Takeuchi di Gedung Pancasila, Jakarta, hari Selasa 5 Juni 2001. Bantuan hibah nantinya akan digunakan untuk membiayai empat proyek, masing-masing proyek Peningkatan Produksi Pangan, Imunisasi Tetanus, Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan dan Rehabilitasi Taman Nasional akibat kebakaran hutan.

Dari keempat proyek tersebut, bantuan Peningkatan Produksi Pangan mendapat dana yang terbesar yakni Yen 1,4 milyar (sekitar Rp 130 milyar) yang akan digunakan untuk biaya pengadaan pupuk, bahan kimia untuk pertanian dan alat-alat/mesin pertanian.

Sementara itu Proyek Peningkatan Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan memperoleh alokasi dana sebesar Yen 309 juta (sekitar Rp 28,7 milyar) berupa peralatan yang langsung dikirim dari Jepang dalam bentuk utuh. Selanjutnya Rehabilitasi Taman Nasional yang rusak akibat kebakaran memperoleh dana sebesar Yen 159 juta (sekitar Rp 14,8 milyar) yang akan digunakan untuk mengembalikan Taman Nasional Way Kambas (Lampung) seluas 400 ha dan Taman Nasional Kutai (Kalimantan Timur seluas 360 ha).

Walaupun memperoleh alokasi dan terkecil sebesar Yen 140 juta (sekitar 13 milyar), Proyek Imunisasi Anti Tetanus memiliki arti yang penting bagi peningkatan kesehatan masyarakat dan menurut rencana akan dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia.

Jakarta, 5 Juni 2001



**REMARKS BY H.E. DR. ALWI SHIHAB
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA**

**AT THE SIGNING CEREMONY OF
THE AGREEMENT ON EDUCATIONAL AND CULTURAL COOPERATION
AND
THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON THE
ESTABLISHMENT OF BILATERAL CONSULTATIONS**

JAKARTA, 30 MAY 2001

Your Excellency,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

It is indeed a great pleasure and privilege for me to have signed, together with Your Excellency, these two important agreements between our two countries: the Agreement on Educational and Cultural Cooperation and the Memorandum of Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations.

These important documents that we have just signed today eloquently reflect the long-standing friendship and cooperation between our two countries. I believe that the implementation of these two Agreements will furnish us with a stronger basis for our efforts to further expand and deepen our existing bilateral relations.

Your Excellency,
Ladies and Gentlemen,

The bilateral relations that we are fostering are not confined to the economic sphere. Thus, today, we have also reaffirmed our commitment to further develop our educational and cultural cooperation. The Agreement on Educational and Cultural Cooperation that we have just signed is in recognition of the need to carry out specific programs of collaboration and exchange in the fields of education, art, culture, information, youth and sports. I am sure that the implementation of this Agreement will bring about a growth of mutual awareness, mutual appreciation and goodwill between our two countries.

In addition to the Agreement on Educational and Cultural Cooperation, we have also signed today the Memorandum of Understanding on the Establishment of Bilateral Consultations. By signing this Memorandum of Understanding, we have once more affirmed our desire that the development of friendly relations and cooperation between Mexico and Indonesia contribute to international peace and security through the growth of mutual confidence, understanding and cooperation.

Your Excellency,
Ladies and Gentlemen,

I am confident that our cooperation will help bring about a better life and a more secure future for the peoples of Mexico and Indonesia. May I therefore take this

Digital Repository Universitas Jember

opportunity to express my sincere appreciation and gratitude to those who were involved in the negotiations toward these Agreements and who made today's signing ceremony possible.

Thank you.

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia





**JOINT STATEMENT
ISSUED BY
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AT THE CONCLUSION OF THE WORKING VISIT OF
H.E. MR. ABDURRAHMAN WAHID
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
TO CAIRO ON FEBRUARY 26, 2001**

1. At the invitation of H.E. Mr. Mohamed Hosny Mubarak, President of The Arab Republic of Egypt, H.E. Mr. Abdurrahman Wahid, President of The Republic of Indonesia, paid a working visit to the Arab Republic of Egypt on February 26, 2001.
2. During the visit, H.E. the President of the Arab Republic of Egypt received H.E. Mr. Abdurrahman Wahid, President of the Republic of Indonesia, and the accompanying delegation.
3. These meetings provided the occasion for a substantive review on developments of the relations between the two countries and for a detailed discussion on methods and ways for strengthening bilateral cooperation as well as a wide ranging exchange of views on important regional and global issues of mutual interest.
4. The two parties highlighted the traditionally close and friendly relations between Egypt and Indonesia, and the mutual understanding and goodwill that characterize these relations. They expressed satisfaction with the progress achieved in cooperation in various ways. They also noted the long tradition of cooperation and coordination between the two countries in international fora, particularly the United Nations, the Non-Aligned Movement, the OIC, the G-77, the G-15 and the D-8.
5. The discussion took place as the international scene has been undergoing significant changes affecting the political, economic, social and cultural landscapes.
6. With this in mind, the two parties discussed wide range of topics which included reform of the United Nations, particularly the restructuring of the Security Council and the reform of its methods of work, nuclear disarmament, efforts to combat the scourge of international terrorism, means of revitalizing the Non-Aligned Movement and enhancing their traditional cooperation within the Movement and other international as well as regional institutions to which they are members international economic relations with special emphasis on the World Trade Organization related issues and South South Cooperation. The two parties noted with concern some current attempts to provide international legality for certain concepts that could entail undermining state sovereignty or justifying intervention in the internal affairs of sovereign states under the pretext of human rights protection without having basis in international law or the United Nations Charter.
7. The two parties discussed the current situation in the Middle East. They expressed their grave concern at the recent developments in the Palestinian territories and the rapidly deteriorating situation there which emanated from the excessive use of force, acts of provocation and killing of innocent civilians that continue to have a negative impact on the entire peace process.

8. They stressed the need to fully implement in good faith agreements reached in the context of the peace process. They also expressed the hope to achieve a final, lasting, just and comprehensive settlement on the Palestinian track, based on Security Council resolutions 242 and 338 and the Land for Peace formula, which would ensure the fulfillment of the legitimate Palestinian rights, including the establishment of an independent and viable state, while simultaneously ensuring the rights of all states of the region to live within secured and internationally recognized boundaries. They also underlined the indispensable need to realize settlements with similar conditions on all other tracks. The two parties also recalled the importance of the early realization of the goal of establishing a Nuclear Weapons Free Zone in the Middle East.
9. The Egyptian leadership reiterated support for the territorial integrity of Indonesia and commended the Government of Indonesia's commitment to and efforts for maintaining national cohesion, regional and global peace.
10. In their review of bilateral relations, the two parties paid special attention to identify specific ways and means for increasing cooperation in various fields on the basis of mutual benefit. They noted the broad spectrum of their relations including political, economic, trade, investment, culture and education, science and technology, human resource development and training, non conventional energy, civil aviation, combating drug trafficking, transitional crime, as well as defense and security.
11. With regard to the economic cooperation, both parties noted that the economic reform and liberalization programs pursued by both countries have provided new opportunities for expanding and diversifying economic cooperation. They also agreed that private sectors in both countries could play a leading role in giving impetus to the possibilities of further cooperation, while the governments could have a vital role in encouraging and facilitating business contacts in order to create awareness of the capabilities and requirements on both sides.
12. The two countries agreed on the need to expand and balance trade relations between Egypt and Indonesia. They agreed to explore all possible sources of financing to enhance the economic and trade cooperations between the two countries. They also agreed to explore the possibilities to overcome the current imbalance trade relations by facilitating measures and to provide enhanced market access in Indonesia for Egyptian products. They agreed to encourage their private sectors participation to increase investment in its respecting country.
13. The two parties expressed their satisfaction on the signing of the following documents:
 - a. A Memorandum of Understanding on the Cooperation in the Field of Population, Family Planning/Reproductive Health and Women Empowerment Programs; and
 - b. A Memorandum of Understanding on Regular Consultations between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Indonesia, represented by the two Ministries of Foreign Affairs.
14. The President of the Republic of Indonesia, H.E. Mr. Abdurrahman Wahid, extended an invitation to H.E. Mr. Mohamed Hosny Mubarak to visit the Republic of Indonesia in order to reinvigorate their traditionally close cooperation in various fields, and to explore new dimensions of it.
15. The discussion were held in a cordial, friendly and positive atmosphere, marked by the spirit of cooperation and mutual understanding, which have always characterized the relations between the two countries.
16. The Indonesia delegation expressed their deep appreciation for the warm welcome and generous hospitality extended by the Government of the Arab Republic of Egypt and for the arrangements made for the visit.

Done at Cairo on February 26, 2001, in two originate in English, both texts being equally authentic.

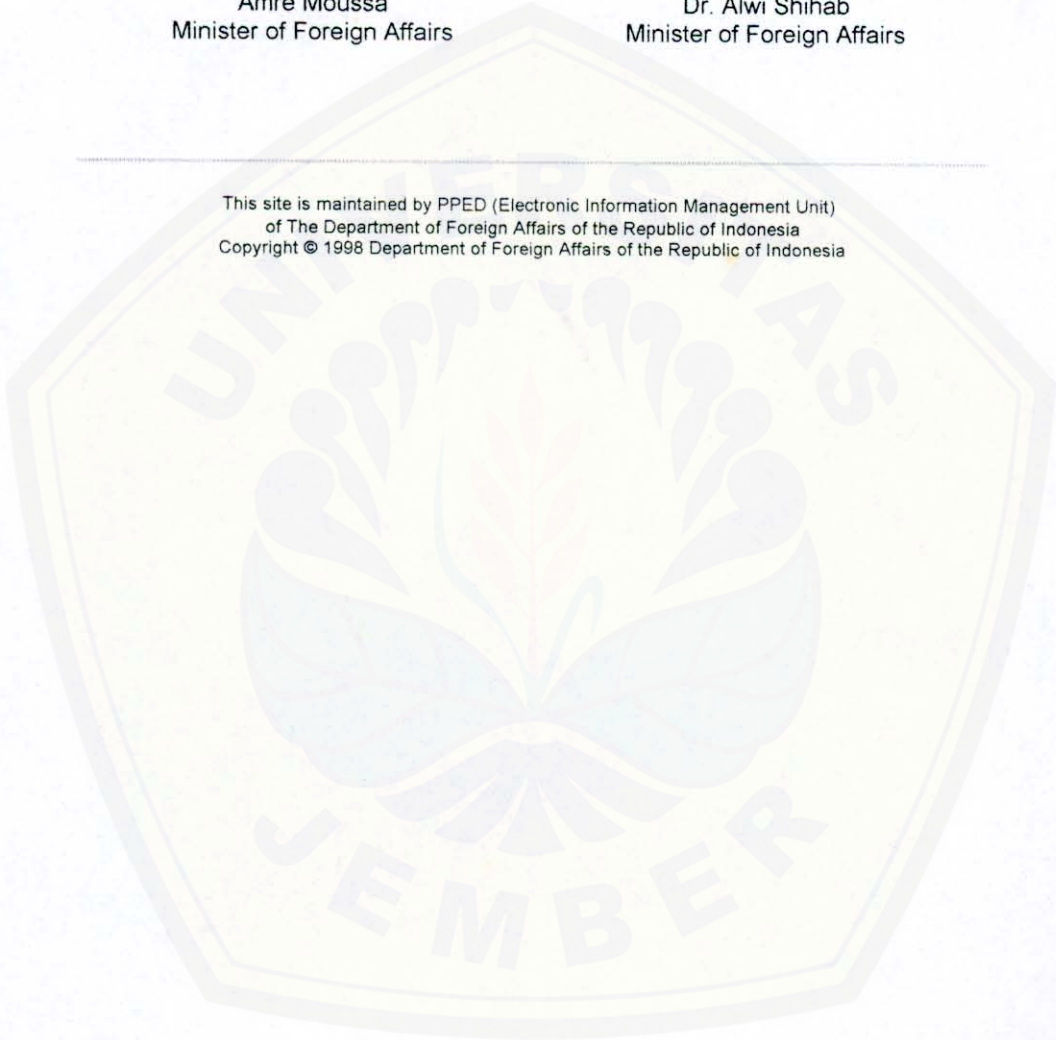
For
The Government
of the Arab Republic of Egypt

signed
Amre Moussa
Minister of Foreign Affairs

For
The Government
of the Republic of Indonesia

signed
Dr. Alwi Shihab
Minister of Foreign Affairs

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia





PRESIDEN BRAZIL ADAKAN KUNJUNGAN RESMI KE INDONESIA

Presiden Brazil Fernando Henrique Cardoso direncanakan akan tiba di Jakarta pada tanggal 22 Januari yang akan datang untuk mengadakan kunjungan resmi dua hari ke Indonesia guna meningkatkan hubungan kerjasama bilateral di bidang politik dan ekonomi.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama yang pernah dilakukan Presiden Brazil sejak dibukanya hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 1953, dan sekaligus dilakukan sebagai balasan kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Brazil pada tanggal 28 September yang lalu.

Selain akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Cardoso juga akan bertemu dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam kunjungan ini, Presiden Cardoso akan didampingi sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Brazil, termasuk Menteri Luar Negeri Luiz Felipe Palmeira Lampreia, Kepala Staf Angkatan Darat dan sejumlah Anggota Parlemen. Dalam rombongan ini ikut serta pula para pengusaha Brazil yang bergerak di bidang industri penerbangan, perbankan dan pertanian dan mereka dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan kalangan usahawan Indonesia dalam suatu seminar yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Hotel Borobudur, Jakarta.





**REMARKS BY THE MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF INDONESIA
AT THE SIGNING CEREMONY
FOR THE ESTABLISHMENT OF HIGH LEVEL JOINT COMMISSION
BETWEEN THE GOVERNMENTS OF INDONESIA AND VENEZUELA**

Jakarta, 29 May 2001

Excellencies,
Distinguished Guests,
Ladies and Gentlemen,

It gives me great pleasure to sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the moU for the establishment of the High Level Joint Commission between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela.

The signing of the MoU reflects a closer relation and cooperation between our two countries, and an existing strong desires of both sides to enhance bilateral relations in various fields such as economic, trade, science, technology, culture, etc.

The significance of this MoU lies in the expectation shared by both sides that it will give a strong impulse for expansion of joint activities in various fields which mutually beneficial to both countries. By having this Joint Commission, we will be able to evaluate and take necessary steps to boost our bilateral relations.

Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

Indonesian exports to Venezuela increased from US\$16.4 million in 1996 to US\$28.5 million in 2000. As it is growing gradually, Venezuela is attractive for a range of Indonesian products such as tires, textiles, garments, glassware, furniture, palm oil, shoes, etc. Imports from Venezuela amounted to US\$12.9 million in 1996, while in 2000 it went down to US\$5,2 million. Indonesian Imports from Venezuela are chemical products, irons, aluminum, steel, etc.

Thus the MoU we have just signed today constitutes an important milestone in our joint efforts to expand and deepen the existing bilateral relations. We will also have chance to exchange information on business opportunities, existing capacities, as well as potentialities endowed in each country.

We will have a long way to go, before we can say we have tapped the full potentialities of our bilateral relation. We do hope that the pace of our progress will be accelerated from here on.

Excellencies,
Ladies and Gentlemen,

In conclusion, allow me to take this opportunity to extend on behalf of the Government of the Republic of Indonesia our highest appreciation and thanks for all parties who have made it possible for us to sign this MoU.

Thank you.

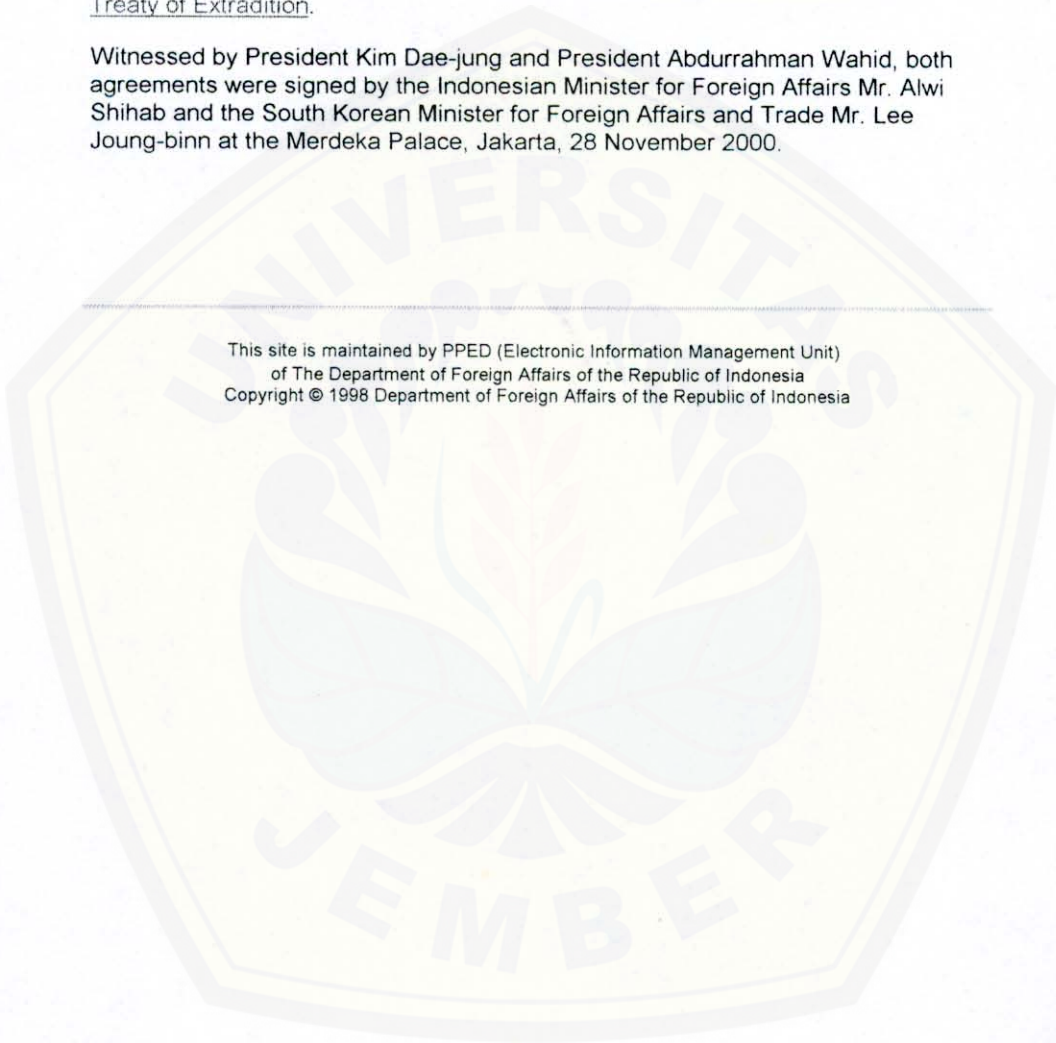


INDONESIA - SOUTH KOREA SIGN AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION AND EXTRADITION TREATY

On the occasion of the President of South Korea's state visit to Indonesia from 27 to 29 November 2000, both governments agree to improve the bilateral relations between the two countries with an [Agreement on Cultural Cooperation](#) and a [Treaty of Extradition](#).

Witnessed by President Kim Dae-jung and President Abdurrahman Wahid, both agreements were signed by the Indonesian Minister for Foreign Affairs Mr. Alwi Shihab and the South Korean Minister for Foreign Affairs and Trade Mr. Lee Joung-binn at the Merdeka Palace, Jakarta, 28 November 2000.

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia





No:

02/PR/G-15/2001

THE ESTABLISHMENT OF HIGH LEVEL JOINT COMMISSION BETWEEN INDONESIA AND VENEZUELA

The MoU for the Establishment of High Level Joint Commission between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela was signed in Jakarta on 29 May 2001.

Minister of Foreign Affairs Mr. Alwi Shihab and his counterpart Mr. Luis Alfonso Luis Garcia signed the memorandum on behalf of their respective Governments.

The signing of the MoU reflects a closer ties between the two countries and indicate strong desire to enhance friendship and cooperation. It will in turn lead to a more intensive and mutually advantageous relationship in various fields such as economic, trade and culture between the two countries.

The High Level of Joint Commission that will be established will meet on a regular basis and exercise the following functions:

- To review and evaluate the Treaties and Agreements signed by both countries;
- To promote the implementation of the Treaties and Agreements on various fields such as trade, economic, science, technology and culture;
- To identify, analyze and evaluate new areas of exchange and cooperation that allow to expand the scope of interests between both countries;
- To propose a mechanism which will expedite the effect of implementation of the Treaties and Agreements signed by both countries.

It is expected that through the High Level Joint Commission, both countries will be able to evaluate and take necessary steps to boost bilateral relations.

Jakarta, 29 May 2001



No. 60/PR/XI/01

**Persetujuan Kerjasama Keuangan Tahun 2000 untuk
Proyek "Pengembangan Pendidikan Pelaut"
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Republik Federal Jerman**

Pada hari Rabu, 28 November 2001 bertempat di Departemen Luar Negeri dilangsungkan Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Keuangan tahun 2000 untuk "Proyek Pengembangan Pendidikan Pelaut" berupa pinjaman lunak sebesar DM 45 Juta (sekitar Rp 166,5 milyar).

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Act. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri, Bachrum Subardjo dan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, H.E. Mr. Gerhard Fulda, atas nama pemerintah masing-masing.

Komitmen bantuan berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2008. Apabila proyek-proyek tersebut di atas tidak terlaksana, atau hanya dapat digunakan sebagian, atas persetujuan kedua pemerintah, dana tersebut dapat digunakan untuk proyek lain dalam periode 8 (delapan) tahun seperti yang dimaksud diatas. Persyaratan Pinjaman adalah jangka waktu pengembalian 30 tahun, bunga 0.75% pertahun dan tenggang waktu 10 tahun.

Proyek ini bertujuan meningkatkan standar pendidikan dan latihan bidang kemaritiman lembaga-lembaga publik Indonesia sehingga mencapai tingkat standar yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization). Paling lambat mulai tahun depan, diperlukan peralatan seperti simulator dan laboratorium serta bahan pengajaran guna memperbaiki mutu pendidikan dan pelatihan. Dengan sertifikat kelulusan yang diakui IMO mereka dapat masuk di dalam bursa pasar tenaga kerja internasional bidang kelautan.

Penandatanganan Persetujuan ini mencerminkan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman pada upaya pemerintah RI dalam meningkatkan kualitas para pelaut Indonesia guna mencapai tingkat standar internasional agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja global. Hal ini sekaligus mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Federal Jerman, atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Jakarta, 28 November 2001



No:

06/PR/II/01

PEMERINTAH BELGIA SETUJU PENJADWALAN KEMBALI HUTANG-HUTANG RI

Pemerintah Kerajaan Belgia setuju untuk menjadwalkan kembali hutang-hutang luar negeri Indonesia yang dibuat tahun 1972-1999 senilai Bfr 453.250.000 (sekitar 95,5 milyar rupiah) yang jatuh tempo pada tahun 2000 dan 2001.

Kesepakatan ini tercantum dalam naskah Protokol Amandemen Persetujuan RI-Belgia yang ditandatangani oleh Dirjen HELN Deplu Dr. Makarim Wibisono dan Duta Besar Belgia di Jakarta Luc Darras di Gedung Pancasila, Deplu hari Jum'at, 16 Februari 2001. Menurut kesepakatan tersebut, Pemerintah RI baru akan memulai membayar cicilan hutangnya pada tanggal 1 Desember 2008 dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2021.

Penandatanganan persetujuan penjadwalan kembali hutang-hutang ini merupakan yang kedua dengan Pemerintah Belgia, setelah persetujuan sebelumnya yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1999, yang mencakup penjadwalan kembali hutang RI sebesar Bfr 441.250.000 (sekitar 93 milyar rupiah).

Kesediaan Pemerintah Kerajaan Belgia untuk menjadwalkan kembali hutang-hutang Pemerintah RI akan membantu meringankan beban neraca pembayaran luar negeri Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda kesulitan ekonomi. Pemerintah RI menghargai dukungan Pemerintah Kerajaan Belgia ini dan mengharapkan agar kerjasama tersebut terus berlanjut, baik secara bilateral maupun melalui Forum CGI.

Jakarta, 16 Februari 2001



No: 60/PR/XI/00

Pemerintah Indonesia dan Jerman Tandatangani Kerjasama Keuangan

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 November 2000 bertempat di Departemen Luar Negeri, telah dilangsungkan Penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman mengenai Kerjasama Keuangan Tahun 1999 untuk Proyek Program Sektor Jalan Kereta Api berupa pinjaman sebesar DM 25.000.000 (sekitar Rp 92,5 milyar) dan "Proyek Pencegahan HIV/AIDS dan Keluarga Berencana" berupa hibah sebesar DM. 20.000.000 (sekitar Rp 74 milyar).

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Alwi Shihab dan Menteri Luar Negeri Republik Federal Jerman, Yang Mulia Joschka Fischer, atas nama Pemerintah masing-masing.

Komitmen bantuan berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2007. Apabila proyek-proyek tersebut di atas tidak terlaksana, atau hanya dapat digunakan sebagian, atas persetujuan kedua pemerintah, dana tersebut dapat digunakan untuk proyek-proyek lain dalam periode 8 (delapan) tahun seperti yang dimaksud diatas.

Bila proyek yang dibiayai dengan hibah dalam rangka kerjasama keuangan diganti dengan proyek di bidang proteksi lingkungan, prasarana sosial atau upaya pengentasan kemiskinan secara swadaya, tambahan hibah masih dapat diberikan sejauh memenuhi persyaratan hibah dalam kerangka kerjasama keuangan, atau suatu bantuan pinjaman lunak diberikan dengan persyaratan masa pengembalian 40 tahun termasuk tenggang waktu 10 tahun dan bunga 0,75% pertahun.

Penandatanganan persetujuan ini mencerminkan dukungan Pemerintah Republik Federal Jerman pada upaya percepatan pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mempererat hubungan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, atas dasar saling menguntungkan.

Jakarta, 2 November 2000



No. 58/PR/X/00

Pemerintah Indonesia dan Italia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Bidang Kebudayaan

Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri Abdurrachman Mattalitti dan Duta Besar Republik Italia untuk Indonesia Alessandro Merola atas nama pemerintah masing-masing telah menandatangani Proses Verbal Pertukaran Piagam Ratifikasi Persetujuan Kebudayaan sebagai kelanjutan dari Persetujuan Kebudayaan antara Indonesia dan Italia yang telah disepakati tiga tahun sebelumnya.

Penandatanganan Pertukaran Ratifikasi Persetujuan Kebudayaan tersebut dilakukan dalam suatu upacara resmi yang diadakan di Gedung Pancasila, Departemen Luar Negeri di Jakarta pada hari Jumat, 20 Oktober 2000.

Dengan ditandatanganinya Proses Verbal Pertukaran Ratifikasi ini, kedua negara memiliki peluang lebih besar untuk memajukan saling pengertian dan hubungan persahabatan melalui kerjasama di bidang seni budaya, pendidikan, olah raga dan penerangan.

Dalam kerangka kerjasama ini, kedua pemerintah akan mendorong peningkatan hubungan antara lembaga-lembaga akademis dan pertukaran tenaga pengajar perguruan tinggi serta pelaksanaan proyek-proyek penelitian yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama.

Kedua pihak juga sepakat untuk memberi kemudahan bagi kunjungan misi kesenian dan seniman kedua negara, disamping meningkatkan pertukaran kunjungan karyawan media massa dan berbagai kalangan yang berkecimpung dalam kegiatan kebudayaan.

Menurut kesepakatan yang tertuang dalam persetujuan ini, kedua pemerintah akan membentuk Komisi Kebudayaan Bersama yang akan melakukan evaluasi pelaksanaan dan prospek kerjasama dalam pertemuan yang akan diadakan bergilir di Indonesia dan Italia setiap tiga tahun sekali.

Jakarta, 20 Oktober 2000



No: 55/PR/X/00

Indonesia- Slovakia Sepakat Untuk Memperkokoh Hubungan Ekonomi

Indonesia dan Slovakia sepakat untuk menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi upaya peningkatan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan diantara kedua negara.

Hal itu terlihat dengan ditandatanganinya naskah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Slovakia oleh Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Rahardjo Jamtomo dan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Slovakia Jaroslav Chlebo atas nama pemerintah masing-masing hari Kamis (12/10) di gedung Departemen Luar Negeri, Jakarta.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda itu diharapkan akan tercipta suatu iklim berusaha yang kondusif bagi para pengusaha di kedua negara demi memacu kerjasama perdagangan dan investasi yang lebih luas.

Jakarta, 12 Oktober 2000



No.53/PR/X/00

Pemerintah RI Terima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Korea Selatan

Pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2000 bertempat di Departemen Luar Negeri telah ditandatangani naskah "Arrangement" antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea. Penandatanganan naskah "Arrangement" dilakukan oleh Direktur Jenderal HELN, Departemen Luar Negeri RI, DR. Johan S. Syahperi dan Duta Besar Republik Korea di Jakarta, H.E. Mr. Kim Jae Sup atas nama Pemerintah masing-masing.

Naskah "Arrangement" yang ditandatangani merupakan pengaturan bagi pelaksanaan proyek "The Improvement of District Hospitals in East Java" dengan nilai tidak lebih dari US\$30 juta (tiga puluh juta dolar AS) dengan persyaratan sebagai berikut: jangka waktu pengembalian 30 tahun, termasuk tenggang waktu 10 tahun, bunga 2% per tahun.

Pinjaman lunak yang disalurkan oleh "Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi Korea" (The Economic Development Cooperation Fund – EDCF) tersebut ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas kualitas, cakupan dan efisiensi pelayanan medik rumah sakit dan pelayanan rujukan propinsi Jawa Timur. Pada saat ini 50% dari RSUD Daerah Kabupaten/kota berada di bawah standar pelayanan antara lain disebabkan penyediaan sarana, prasarana dan peralatan yang kurang memadai baik dari segi usia, jenis dan jumlah, juga karena keterbatasan tenaga kesehatan yang terampil seperti dokter spesialis.

Adapun sasaran proyek tersebut adalah untuk:

1. Melengkapi peralatan dan mendukung pelayanan medik bagi RSUD,
2. Mengembangkan optimalisasi berfungsinya jaringan rujukan medik dengan pendekatan yang inovatif seperti pengembangan jaringan telemedik serta
3. Pelatihan bagi tenaga kesehatan baik untuk memenuhi standar ketrampilan maupun untuk pengoperasian peralatan medik dan pendukung lainnya.

Rumah Sakit di Jawa timur yang diusulkan untuk dibiayai proyek ini adalah sebanyak 21 Rumah Sakit, 2 diantaranya adalah Rumah Sakit Umum dan 19 lainnya adalah Rumah Sakit Daerah.

Jakarta, 5 Oktober 2000



No. 22/PRV/00

Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Cina Tang Jiaxuan menandatangani "Nota Kesepahaman tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral" dan "Pernyataan Bersama tentang Masa Depan Kerjasama Bilateral" yang dilakukan di Beijing hari Senin, tanggal 8 Mei 2000.

Penandatanganan kedua dokumen tersebut dimaksudkan untuk lebih memperluas dan memperkuat landasan hubungan kerjasama bilateral yang telah terbina antara kedua negara selama ini.

Menlu Alwi Shihab tiba di Beijing Senin pagi untuk kunjungan empat hari atas undangan Menlu Tang Jiaxuan dalam rangka menindaklanjuti hasil kunjungan kenegaraan Presiden Abdurrahman Wahid ke Cina bulan Desember yang lalu dan sekaligus untuk menghadiri peringatan 50 tahun pembukaan hubungan diplomatik RI-RRC.

Komisi Bersama yang baru dibentuk dimaksudkan sebagai payung bagi berbagai mekanisme kerjasama bilateral guna meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsultasi yang lebih efektif antara pemerintah kedua negara. Sedangkan Pernyataan Bersama tentang Pedoman Masa Depan Kerjasama Bilateral akan dijadikan landasan bagi memperluas kerjasama di segala bidang yang perlu mendapat perhatian kedua pemerintah, termasuk kerjasama di sektor perdagangan, investasi, keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping juga bidang pertanian, perikanan, kehutanan, energi, kesehatan, kepemudaan dan pendidikan, politik, serta pertahanan dan keamanan regional.

Pada pertemuan kedua delegasi, yang masing-masing dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, telah dilakukan pertukaran pandangan mengenai kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Dalam pembicaraan itu, kedua belah pihak memandang penting perlunya peningkatan kerjasama melalui pertukaran kunjungan para pejabat dan anggota parlemen kedua negara maupun melalui kunjungan misi dagang, kebudayaan dan kesenian serta kalangan akademisi dan pejabat-pejabat militer maupun rakyat pada umumnya guna lebih mendorong terjalinnya hubungan bersahabat yang berjangka panjang di antara kedua negara. Selain itu, kedua delegasi telah menyatakan rasa puas atas pesatnya perkembangan hubungan kedua negara sejak dipulihkannya hubungan diplomatik tanggal 8 Agustus 1990.

Pada kunjungan hari kedua di Beijing, Menlu Alwi Shihab telah melakukan kunjungan kehormatan kepada Wakil Presiden Hu Jintao dan Perdana Menteri Zhu Rongji.

Hari Rabu 10 Mei besok Menlu Alwi Shihab akan menghadiri pembukaan konperensi bisnis "Cina dan Asia Pada Peralihan Abad : Kesempatan Bagi Dunia Bisnis" yang diselenggarakan oleh "Asia Society" di kota Shanghai, disamping mewakili Presiden Abdurrahman Wahid memberikan ceramah mengenai : "Masa Depan Reformasi Indonesia" pada konperensi tersebut.

Jakarta, 9 Mei 2000



Final Version

**JOINT PRESS COMMUNIQUÉ BETWEEN
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
AND
THE REPUBLIC OF INDONESIA
BEIJING, DECEMBER 3, 1999**

At the invitation of His Excellency Jiang Zemin, President of the People's Republic of China, His Excellency K. H. Abdurrahman Wahid, President of the Republic of Indonesia paid a state visit to the People's Republic of China from December 1 to 3, 1999.

During the visit, President Jiang Zemin and President K. H. Abdurrahman Wahid held productive talks on bilateral relations and other major regional and international issues of common interest and reached broad agreement and understanding. Both sides believed that President Wahid's visit to China was a complete success and of great significance to the joint efforts to deepen China – Indonesia relations in the future.

The two sides reviewed the progress of the bilateral relations following the resumption of diplomatic ties in 1990 and expressed their satisfaction with the progress made in all areas of cooperation. The two sides maintained that the friendly relations and cooperation on the basis of equality, mutual benefit, mutual understanding and respect between the two countries conformed to the fundamental interests of the two nations. The two sides believed that the strengthening of the friendly relations and cooperation would further contribute to peace, stability and prosperity both in the region and the world.

The two sides were of the view that at the turn of the century China-Indonesia relations are faced with important opportunities for further improvement and growth. The two sides reaffirmed their willingness to consolidate further the existing traditional friendship on the basis of the Five Principles of Peaceful Co-existence and the Ten Principles of the Bandung Conference, and reiterated their joint commitment to the establishment and development of a long-term and stable relationship of good-neighbourliness, mutual trust and all-round cooperation. To this end, Foreign Ministries of the two countries agreed to conclude a framework document on the 21st century-oriented cooperation at an early date.

The two sides believed that frequent exchange of high-level visits and contacts would be conducive to the sound and steady development of the bilateral friendly relations. The two sides agreed to make full use of the existing forums of bilateral consultations, strengthen the friendly exchange of visits between officials or members of government departments, parliaments, political parties, military circles and non-governmental organizations of the two countries, and intensify cooperation in such areas as culture, education, health, public housing, sports and tourism, so as to promote the all-round and in-depth development of the bilateral friendly relations and cooperation.

The two sides are fully satisfied with the achievements the two countries have made in trade and economic cooperation, and agreed to further expand their mutually beneficial cooperation in areas such as trade, investments, science and technology, industry, agriculture, forestry and plantation, fishery, energy, mining, telecommunication and finance. The two sides will make concerted efforts to promote a more conducive environment for better trade and economic cooperation, increase transparency and impartiality of trade related regulations, impel closer contacts and mutually beneficial cooperation of various forms between business communities of the two sides, and hold regular joint investment promotion. In order to materialize the intended cooperation agreed upon by the leaders of the two countries, the two sides decided that the Fifth Sino-Indonesian Joint Economic and Trade Commission would meet in the first half of next year and that the Chinese side will send an entrepreneurs delegation to Indonesia at the

earliest possible date.

The two sides reiterated their adherence to the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity. The Chinese side expressed its support to the Indonesian government's efforts to maintain national unity and territorial integrity. The Chinese side holds that stability and prosperity in Indonesia is conducive to regional peace and development. The Indonesian side reiterated its continuing adherence to the one China policy and its recognition that the Government of the People's Republic of China is the sole legal government representing the entire Chinese people, and that Taiwan is an integral part of China.

The two sides exchanged views on the current regional economic situation. The Chinese side noted with pleasure that Indonesia and other countries concerned in the region are making positive progress in their economic recovery. The Indonesian side expressed its appreciation to the continuing support of China to Indonesia since the outbreak of the Asian economic and financial crisis. The two sides believed that the Asian countries should uphold their own values, choose their development path in line with their actual national conditions, and conduct more extensive cooperation so as to jointly confront opportunities and challenges brought by the economic globalization.

The two sides expressed satisfaction with the continuous development and positive results of China-ASEAN friendly relations in recent years. The Chinese side expressed its appreciation to Indonesia for its role in promoting the development of China-ASEAN relations and expressed support to its efforts to enhance ASEAN solidarity and cooperation and push for a bigger ASEAN role in international and regional affairs. The two sides reaffirmed their continued commitment to a China-ASEAN friendly and cooperative relationship of good-neighbourliness and mutual trust. The two sides highly value the achievements and the importance of the progress achieved in the Informal Leadership meeting between ASEAN and China, Japan, ROK recently held in Manila, and stand ready to contribute to the further progress of the East Asian dialogue and cooperation process, essential for fostering regional peace, stability and prosperity.

The two sides were of the view that profound changes are taking place in the international situation and that multipolarization is a general trend in international relations. The two sides emphasized that the United Nations Charter, the Five Principles of Peaceful Co-existence, the Ten Principles of the Bandung Conference and the universally recognized basic norms governing international relations should continue to be the basis of a new international political, economic and security order which is more just and balanced, and should therefore be observed by all nations. No country has the right to interfere in the internal affairs of other sovereign states under whatever pretext.

The two sides reaffirmed their position that both the universality of human rights and the national particularities of each country, including its cultural background, should be respected. The two sides considered it essential to exchange views on the promotion of human rights at the international level based on the spirit of cooperation, dialogue and non-confrontation as well as respect for the principles of state sovereignty and non-interference in internal affairs. The two sides maintained that human rights issues can not be solved by sacrificing the principles of state sovereignty and sovereign equality among nations and there must be a solution that does not contravene or undermine the principles on which the United Nations itself was founded.

The two sides supported the endeavours of forging a universal and effective compliance with the implementation of the provisions of bilateral as well as multilateral agreements on disarmament, in particular weapons of mass destruction. Failure to comply with these treaties will only threaten regional and global peace and stability. The two sides agreed that the Anti-Ballistic Missiles (ABM) Treaty plays an important role in maintaining international peace, security and strategic stability. The two sides shared the view that the Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Weapon-Free Zone constitutes an important contribution to the regional and global peace and stability. The Chinese side reiterated its readiness to sign the Protocol of the Treaty.

Digital Repository Universitas Jember

The two sides reiterated that they will strengthen their consultation and cooperation at UN, WTO, APEC, ASEM, and other multilateral organizations. The two sides reaffirmed that they will continue to support the solidarity and cooperation among developing countries, and the Non-Aligned Movement, and that they are willing to work together for the establishment of a fair and equitable new international political and economic order and for the maintenance of world peace and stability.

President Wahid thanked the Government and people of the People's Republic of China for the gracious hospitality, and invited President Jiang Zemin to visit the Republic of Indonesia at an early date. President Jiang Zemin accepted the invitation with pleasure.

This site is maintained by PPED (Electronic Information Management Unit)
of The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
Copyright © 1998 Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia





Nomor : 680/J25.3.1/PL.5/2002
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian

21 Juni 2002

Kepada : Yth.

1. Sdr. Kepala Perpustakaan Pusat Univ. Jember
 2. Sdr. Dekan FISIP Universitas Jember
 3. Sdr. Pemimpin Perpustakaan CSIS Jakarta
 4. Sdr. Pemimpin Perpustakaan LIPI Jakarta
 5. Sdr. Pemimpin Perpustakaan Pusat Univ. Gajahmada Yogya
 6. Sdr. Pemimpin Perpustakaan FISIP Univ. Gajahmada Yogya
 7. Sdr. Pemimpin Perpustakaan Litbang Dep. Luar Negeri Jakarta
 8. Sdr. Pemimpin Biro Pusat Statistik Surabaya.
- di -

TEMPAT.

Menunjuk surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember No. 1922/J25.1.2/PL.5/2002 tanggal 20 Juni 2002, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : FARID FARAITODY / 97-1230
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Hubungan Internasional
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 86 Mojokerto.
Judul Penelitian : Pengaruh Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid Ke Luar Negeri Terhadap Perbaikan Kondisi Politik Dan Ekonomi Di Indonesia.
Lokasi : Jember - Surabaya - Yogyakarta - Jakarta.
Lama Penelitian : 3 (satu) bulan.

Maka kami mohon dengan hormat bantuan serta perkenan saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan saudara disampaikan terima kasih.



Ketua,

Dr. Ir. T. Sutikto
Dr. Ir. T. Sutikto, MSc.
NIP. 131 131 022

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs.
3. Arsip.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : FARID FARAITODY

Status : MAHASISWA

Alamat: JL. JAWA I Ib No. 3 JEMBER

Telah melaksanakan research/survey pada
Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang :

.....PENGARUH KUNJUNGAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID
.....KE LUAR NEGERI TERHADAP UPAYA PERBAIKAN KONDISI
.....POLITIK DAN EKONOMI DI INDONESIA
.....
.....
.....

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 20 JULI 2002



Maria Margrith Tirtasari

Pustakawan



Kepada Yth.
Dr. Ir. T. Sutikno, MSc.
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jl. Kalimantan No.37 Jember
JAWA TIMUR 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 009/Rea/Perp/PDII/2002

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,



N a m a : Ir. Sri Hartinah, M.Si.
NIP : 320005925
Jabatan : Kepala Sub Bidang Jasa Perpustakaan


Menerangkan bahwa,

N a m a : FARID FARAITODY
Nomor Pokok : 97-1230
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Hub. Internasional
FISIP - Universitas Jember

Telah mengadakan studi literatur/pustaka di Perpustakaan Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - LIPI.



Jakarta, 18 Juli 2002
Kepala Sub Bidang Jasa Perpustakaan,


Ir. Sri Hartinah, M.Si.
NIP: 320005925